

MS. Faridy



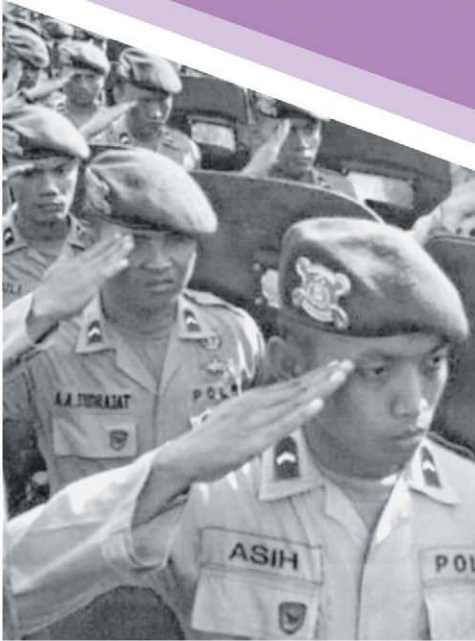
Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SMP/MTs Kelas IX



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

3



Pendidikan Kewarganegaraan

untuk Siswa SMP/MTs Kelas IX

3



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP/MTs Kelas IX

Penulis : MS. Faridy
Editor : -
Design Cover : Adit H. Ardianto
Setting/Layout : Adryan Candra

Ukuran Buku : 17,6 x 25,0 cm

370.114 7

FAR FARIDI, MS

Pendidikan Kewarganegaraan 3 untuk SMP/MTs Kelas IX /
penulis Faridi, MS ; . — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009
vi, 96 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 92

Indeks : hlm. 95

ISBN 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-890-2

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I Judul

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari penerbit Sutra Benta Perkasa

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009.

Diperbanyak oleh . . .



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009

Kepala Pusat Perbukuan



KATA PENGANTAR

Persoalan kewarganegaraan memang menarik untuk dikaji dan dipahami secara mendalam oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelajar. Pengkajian dan pemahaman masalah kewarganegaraan tersebut sangat penting agar siswa sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian siswa memiliki orientasi hidup (ideologi) yang terarah sesuai ideologi bangsa kita serta mampu memaknai hakikat perjuangan para pendiri negara kita. Pada akhirnya siswa mampu memberikan keteladanan dan manfaat bagi lingkungannya.

Berpijak dari konsep di atas, maka kami menyusun buku Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP ini. Buku ini di dalamnya memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, penyajian materi disampaikan secara padat, tajam, dan enak dibaca; gambar-gambar disajikan secara tematik. Selain itu berbagai pengayaan, seperti “Cakrawala” dan “Tokoh” menghiasai setiap materinya. Beragam latihan, seperti “Opini”, “Tugas”, dan “Uji Kompetensi” mewarnai isi buku ini.

Sebagai media pembelajaran, buku ini kami harapkan dapat menjadi media alternatif yang dapat memuaskan siswa dan membawa siswa ke dalam masyarakat madani. Para siswa akan menjadi masyarakat yang melek informasi, demokratis, terbuka, dan tentu saja memiliki multi kecerdasan atau kecerdasan majemuk. Paling tidak buku ini dapat memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi siswa dan pendidik untuk senantiasa hidup rukun dan damai serta bangga terhadap bangsanya. Dengan demikian akan senantiasa berusaha menjaga nama baik bangsa dengan bertingkah laku secara baik dan benar.

Kami senantiasa terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Pekanbaru, Mei 2007

Penulis



Daftar Isi

Kata Sambutan_iii

Kata Pengantar_iv

Daftar Isi_v

Bab 1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembelaan Negara_1

A. Pentingnya Usaha Pembelaan
Negara_3

B. Bentuk-Bentuk Usaha
Pembelaan Negara_13

C. Peran Serta dalam Usaha
Pembelaan Negara_15

Uji Kompetensi_18

Bab 2 Pelaksanaan Otonomi Daerah_21

A. Pengertian Otonomi Daerah_23

B. Partisipasi Masyarakat dalam
Perumusan Kebijakan Publik_32

Uji Kompetensi_42

Evaluasi Semester 1_46

Bab 3 Globalisasi_49

A. Pengertian dan Pentingnya
Globalisasi bagi Indonesia_51



- B. Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional pada Era Global_54
- C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara_57
- D. Menentukan Sikap terhadap Dampak Globalisasi_58

Uji Kompetensi 60

Bab 4 Berprestasi Demi Keunggulan Bangsa_63

- A. Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa_65
- B. Mengenal Potensi Diri untuk Berprestasi Sesuai Kemampuan_67
- C. Peran Serta dalam Berbagai Aktivitas untuk mewujudkan Diri Sesuai Kemampuan Demi Keunggulan Bangsa_79

Uji Kompetensi_86

Evaluasi Semester 2_89

Daftar Pustaka_92

Glosarium_93

Indeks_95



Partisipasi Masyarakat dalam Pembelaan Negara

Pembelaan negara merupakan kontribusi sekaligus bentuk kepatuhan warga negara terhadap negaranya sendiri. Jadi, pembelaan negara tidak hanya dibebankan pada pemerintah, aparat TNI dan Polri. Adanya usaha pembelaan negara bukan dimaksudkan untuk melakukan agresi terhadap negara lain. Hal itu lebih bertujuan sebagai antisipasi sekaligus jaga-jaga jika suatu saat negara kita mendapat ancaman dari dalam maupun luar negeri. Tindakan ini tidak lain merupakan bagian dari prinsip penjagaan kedaulatan. Apa yang dimaksud pembelaan negara? Bagaimana wujud pembelaan negara pada zaman sekarang? Mengapa pembelaan negara perlu dilakukan dan melibatkan seluruh warga negara? Untuk menjawabnya, mari ikuti pelajaran Bab 1 ini dengan saksama.

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara.
2. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara.
3. Siswa mampu menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara.



Gambar 1.1 Partisipasi warga negara dalam bela negara dapat disalurkan melalui institusi kepolisian.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Kata Penting

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| - Partisipasi | - Negara | - Bela negara |
| - ZEE-Rakyat | - Hankamrata, Siskamling | - Wilayah-Separatisme, agresi |
| - Kedaulatan pemerintah | - Ancaman dari dalam, | - Kebijakan |
| - Pembelaan negara | ancaman dari luar | - Pembelaan negara secara nonmiliter |

PETA KONSEP



A.

Pentingnya Usaha Pembelaan Negara

Negara Indonesia memiliki area darat dan laut yang sangat luas. Bahkan, area lautnya pun merupakan salah satu yang terluas di dunia. Tidak kurang dari 13.600 pulau dan 220 juta penduduk mendiami wilayah darat Indonesia. Dengan luas darat dan laut yang demikian besar, tanggung jawab untuk menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya pembelaan negara yang dilakukan oleh aparat pertahanan dan keamanan maupun oleh rakyat sendiri.

Bagaimanapun juga, seperti halnya kita memiliki rumah sendiri maka yang bertanggung jawab untuk menjaganya adalah penghuninya sendiri. Rumah yang kita huni itu harus dijaga dari kecelakaan dan tindak kriminal serta potensi-potensi ancaman lainnya yang berasal dari dalam maupun dari luar rumah! Upaya pembelaan perlu dilakukan negara karena adanya negara yang mesti dijaga.

1. Pengertian Negara

Istilah negara berasal dari kata *state* (bahasa Inggris), *etat* (Prancis), atau *staat* (Belanda dan Jerman). Kata-kata tersebut ternyata diambil dari bahasa Latin, yaitu dari kata *status* atau *stacum* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Menurut para ahli, salah satu diantaranya Roger H. Soltau, negara artinya alat atau wewenang yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Sementara itu, menurut Mac Iver, negara adalah perkumpulan yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat wilayah tertentu dengan berdasar sistem hukum. Untuk maksud tersebut negara diberikan kekuasaan untuk memaksa. Jadi, negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu wilayah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

2. Syarat Terbentuknya Negara

Syarat terbentuknya atau berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Hal itu sesuai dengan rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933, dan oleh Mahfud MD disebut unsur konstitutif. Syarat tambahan lainnya adalah adanya pengakuan internasional dari negara lain, yang disebut oleh Mahfud MD sebagai unsur deklaratif. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dimiliki maka tidak bisa disebut negara.

a. Rakyat

Keberadaan rakyat tidaklah bisa diabaikan karena rakyatlah yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan terhadap negara. Tidak mungkin suatu negara tanpa memiliki rakyat. Rakyat yang dimaksud di sini adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu serta mereka tunduk pada kekuasaan negara.



Gambar 1.2 Profil rakyat Indonesia, potensi besar untuk pembelaan negara.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah sekumpulan orang yang telah memenuhi syarat-syarat administratif tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan negara. Sekumpulan orang tersebut diperkenankan memiliki tempat tinggal/domisili di negara itu. Adapun rakyat dikatakan bukan penduduk apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai penduduk.

Sementara itu, penduduknya dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara. Penduduk warga negara atau disebut warga negara adalah orang-orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dan memiliki kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tertentu. Adapun penduduk bukan warga negara atau disebut juga warga negara asing (WNA) adalah orang-orang yang diperkenankan menetap untuk sementara waktu di suatu negara. Di Indonesia perihal penduduk dan warga negara diatur dalam UUD 1945 beserta amandemennya pada pasal 26 – 28.

b. Wilayah

Wilayah kedaulatan suatu negara pada umumnya dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah darat suatu negara biasanya memiliki garis batas/perbatasan dengan wilayah negara lain yang berupa laut atau perairan (sungai, danau, dan lain-lain), wilayah darat (pegunungan, bukit, lembah), garis batas buatan (pagar tembok, pagar kawat berduri), dan garis batas lain berupa garis lintang dan bujur.

Negara kita yang memiliki luas daratan mencapai 1,9 juta km² berbatasan dengan negara lain. Di wilayah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Di bagian barat, berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Samudra Hindia. Sementara di bagian selatan berbatasan langsung

dengan Samudera Indonesia dan Benua Australia serta Timor Timur. Dan bagian utara berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik.



Gambar 1.3 Wilayah Indonesia, harus dipertahankan dan dibela dari setiap ancaman.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Wilayah laut atau perairan suatu negara di dalamnya termasuk sungai, danau, laut, selat, dan teluk. Di luar wilayah perairan teritorial tersebut disebut laut bebas yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum laut internasional. Perlu kamu ketahui bahwa luas perairan/laut Indonesia lebih luas dibanding luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 7,9 juta km² atau seluas 81% dari seluruh wilayah negara kita.

Dalam konvensi hukum laut PBB tahun 1982, Indonesia telah berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan (Archipelago States). Dalam konvensi tersebut ditetapkan wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya sebagai berikut.

- 1) Laut Teritorial, adalah lautan yang merupakan batas wilayah perairan suatu negara yang luasnya mencapai 12 mil laut dan diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar atau garis pantai ketika air surut.
- 2) Zona Tambahan, adalah laut teritorial ditambah 12 mil laut yang dihitung berdasarkan garis atau batas luar laut teritorial. Jadi, total zona tambahan ini adalah 24 mil laut.
- 3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1983. Luas ZEE Indonesia adalah 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dengan ditetapkannya ZEE Indonesia, pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya alam, memberikan kebebasan bagi pelayaran dan penerbangan internasional serta pemasangan kabel bawah laut yang dijamin hukum internasional.

- 4) Landas Kontinen, adalah daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut teritorial sedalam 200 meter atau lebih.
- 5) Laut pedalaman, adalah lautan dan selat yang berada pada bagian dalam garis dasar yang menghubungkan pulau-pulau dalam wilayah suatu negara. Laut dalam hanya dimiliki oleh negara kepulauan seperti Indonesia.
- 6) Landas Benua, adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di luar ZEE yang lebarnya mencapai 200 mil laut di laut bebas.

Berbeda dengan wilayah darat dan laut, wilayah udara berada di atas wilayah daratan dan lautan suatu negara. Ruang udara yang berada di atas daratan dan lautan suatu negara menjadi batas udara teritorial suatu negara.

c. Pemerintahan yang Berdaulat

Syarat ketiga terbentuknya negara adalah pemerintah yang berdaulat. Syarat ini sekaligus merupakan bagian dari alat kelengkapan negara yang berfungsi memimpin organisasi rakyat/negara dalam mencapai tujuan negara.

Pengertian pemerintah ada dua, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan badan pengurus negara dengan segala organisasi, bagian, dan semua pejabatnya dari pusat sampai ke pelosok daerah. Dalam pengertian ini, pemerintah adalah gabungan semua badan kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pusat hingga daerah.

Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seseorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan yang menentukan dalam pelaksanaan tugas negara. Secara lebih jelas, pemerintah dalam pengertian ini adalah lembaga eksekutif, yakni kepala negara dan para menteri. Menurut UUD 1945, pemerintahan dalam arti sempit di Indonesia ialah presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri.

Pemerintah tersebut merupakan pemerintah yang sah, yang diberi wewenang oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan undang-undang. Pemberian wewenang tersebut umumnya dilakukan melalui pemilu.

d. Pengakuan dari Negara Lain

Syarat ini sebenarnya bersifat *de jure* karena melibatkan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Negara Indonesia telah lahir secara *de facto* pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan pengakuan secara *de jure* diperoleh Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengakuan secara *de jure* diperoleh saat UUD 1945 disahkan, terpilihnya presiden dan wakil presiden, dan dibentuknya KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai lembaga legislatif/DPR/parlemen.

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Moh. Hatta merupakan tonggak sejarah bagi lahirnya negara Indonesia. Pembentukan negara Indonesia tidaklah mudah. Melalui perjuangan mengusir penjajah dari bumi Nusantara selama 3,5 abad, Indonesia berhasil membentuk negara.

Setelah terbentuknya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, ternyata juga tidak mudah untuk mempertahankan dan mengelolanya. Ancaman yang datang dari kaum penjajah Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia dan jatuh banggunya pemerintahan periode 1945–1965 telah menjadi penyebab utama tidak stabilnya negara saat itu. Hal inilah menunjukkan betapa pentingnya negara Indonesia dijaga dan dibela oleh rakyatnya sendiri. Dengan penjagaan itu negara kita tetap eksis dan lepas dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi menghancurkan negara kita.



Gambar 1.4 Aparat Polri sedang bertugas mengamankan dan mempertahankan negara.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Belanegara adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam usaha menjaga ketertiban umum, keamanan, dan pertahanan negara. Penyelenggara ketertiban umum dan keamanan selama ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri bertugas menertibkan para perusuh, meredam tindak kejahatan nasional maupun transnasional serta terorisme, menindak perbuatan asusila dalam masyarakat, mengatur serta menata perlalulintasan di darat maupun laut, dan lain-lain. Selama ini aparat Polri jumlahnya

sangat terbatas, perlengkapan militer yang dimilikinya masih terbatas pula, sedangkan para pelanggar ketertiban dan keamanan terutama tindak kriminal baik kuantitas maupun kualitasnya terus semakin canggih dan mengalami peningkatan. Selain itu, area penanganan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawabnya mencakup seluruh wilayah Indonesia yang begitu luas. Adapun tanggung jawab menjaga pertahanan negara diemban oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terdapat beberapa alasan mengapa bela negara sangat penting dilakukan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Dampak negatif dari arus globalisasi yang semakin deras masuk ke Indonesia akan menimbulkan kerawanan sosial, politik, budaya, maupun militer.
- b. Keinginan negara industri menguasai wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.
- c. Perang terbuka dan modern yang mengancam wilayah NKRI.
- d. Keinginan negara-negara besar yang ingin menguasai wilayah Indonesia yang strategis karena letaknya di persimpangan dua benua dan dua samudera.

Alasan di atas menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat untuk membantu aparat Polri dalam mengatasi masalah ketertiban umum dan keamanan negara. Upaya bela negara membantu Polri dapat melalui jalur formal maupun nonformal. Jalur formal yang dimaksud adalah dengan cara mengikuti tes menjadi prajurit karir dan perbantuan di Polri. Sementara itu, jalur nonformal dapat diikuti seluruh masyarakat dengan mengadakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing dan berprestasi di tingkat internasional pada bidang apapun. Misalnya, melakukan kegiatan ronda setiap malam secara bergiliran yang dipimpin oleh anggota Hansip (Pertahanan Sipil) dan kepala dusun atau kepala desa setempat. Contoh lainnya, adalah siswa-siswi yang berprestasi dalam Olimpiade Fisika Internasional, serta olahragawan seperti Taufik Hidayat dan Chris John yang berprestasi di tingkat dunia dalam olahraga bulu tangkis dan tinju.

Membela negara sangat penting dilakukan karena negara kita tidak tertutup kemungkinan suatu ketika mendapat serangan dari dalam maupun luar negeri. Bahkan di negara tertentu rakyat diwajibkan melakukan bela negara sehingga ada istilah dan program wajib militer bagi penduduk yang sudah genap berusia 18 tahun ke atas.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan pembelaan negara sebenarnya sudah tercantum secara jelas dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 terutama pasal 27 ayat 3 dan Bab XII pasal 30, yaitu:

- a. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3);
- b. tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1);
- c. usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (pasal 30 ayat 2);

- d. TNI terdiri atas TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (pasal 30 ayat 3);
- e. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (pasal 30 ayat 4);
- f. susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dengan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang (pasal 30 ayat 5);
- g. kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan (Pembukaan UUD 1945);
- h. pemerintahan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945);



Gambar 1.5 Aparat TNI sedang apel siaga, siap mempertahankan keamanan dan ketertiban.

Sumber: www.kompas.com/berita

Terkait dengan UUD 1945 Bab XII pasal 30 tersebut di atas, disebutkan ada beberapa kekuatan atau komponen masyarakat dalam upaya pembelaan negara, yaitu sebagai berikut.

- a. Komponen utama. Komponen utama ini ditempati oleh TNI, baik TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU maupun Polri. Kekuatan utama ini berada di garis depan dalam usaha pembelaan negara.
- b. Komponen cadangan. Komponen ini terdiri atas seluruh warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang dapat dikerahkan untuk mempertahankan atau memperkuat komponen utama.
- c. Komponen pendukung. Contoh komponen terakhir ini adalah keikutsertaan rakyat dalam pembelaan negara dengan cara membentuk Sishankamrata (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta), seperti:
 - 1) Hansip (Pertahanan Sipil);
 - 2) Wanra (Perlawanan Rakyat);

- 3) Kamra (Keamanan Rakyat);
- 4) Menwa (resimen Mahasiswa);
- 5) SAR, PMI, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan atau operasionalisasinya, pemerintah selain memiliki dan menentukan prinsip-prinsip pembelaan negara juga menentukan landasan hukumnya, yaitu dengan menetapkan:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Serangan atau ancaman dari dalam negeri dapat datang dari warga negara Indonesia sendiri. Misalnya, tindakan terorisme Bom Bali I dan II, bom Kuningan atau di Kedutaan Besar Australia, bom Poso, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut sangat mengganggu keamanan di negara kita. Bahkan, beberapa kali pemerintah Australia, Amerika Serikat, dan Inggris menerapkan kebijakan Travel Warning atau melarang warganya untuk bepergian ke Indonesia karena dinilai tidak aman.



Gambar 1.6 Aparat TNI dan kapal perang TNI-AL sedang berjaga-jaga di Teluk Ambalat menghadapi ancaman dari luar.

Sumber: www.wikipedia.com

Adapun serangan dari luar dapat berupa ancaman yang bersifat fisik atau militer, ideologi maupun ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti telah kamu ketahui bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, aparat militer/TNI jumlahnya masih sangat sedikit. Begitu pula

perangkat militer yang dimilikinya untuk menjaga pertahanan di darat, laut, dan udara, masih jauh dari memadai. Perlengkapan dan peralatan militer yang ada pun sebagian besar telah berusia tua.



Gambar 1.7 Seorang tentara menyita bendera, atribut, dan senjata milik GAM. Setiap ancaman terhadap keutuhan negara harus dimusnahkan.

Sumber: www.Wikipedia.com

Perlu kamu ketahui bahwa fungsi keamanan dan ketertiban yang diemban oleh Polri berbeda dengan fungsi pertahanan yang dibebankan kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tugas utama aparat TNI adalah menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Mereka difungsikan menjadi aparat teritorial dan tempur. Apabila ada gangguan dari dalam maupun dari luar negeri yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, prajurit TNI-lah yang pertama dan terdepan dalam menghadapinya.

TNI melakukan pembelaan negara dengan cepat, misalnya, dalam kasus gerakan separatisme di Timor Timur pada era 1970 sampai 1990-an dan kasus GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang hendak memisahkan diri dari NKRI. TNI melakukan tugasnya dengan berat. Pada akhirnya Provinsi Timor Timur lepas dari NKRI dan menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat, menghadapi hal itu perjuangan TNI saat itu benar-benar dihadapkan pada situasi sulit. Bahkan, beberapa perwira menengah dan tinggi TNI didakwa melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Belum lagi dalam dua dasawarsa terakhir muncul pula gerakan separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian Barat dan RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku. Di wilayah Poso, Sulawesi Tengah pun kerusuhan demi kerusuhan yang mengancam keamanan dan keutuhan wilayah NKRI sampai tahun 2006 masih terus terjadi.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa potensi ancaman yang datang dari dalam negeri pun tidak kalah mengkhawatirkannya dibanding ancaman dari luar. Ancaman dari luar, contohnya terjadi pada tahun 2005 lalu.

Ketika itu, kapal-kapal perang Angkatan Laut Diraja Malaysia melakukan provokasi terhadap TNI-AL dengan memasuki wilayah Teluk Ambalat secara paksa. Sebelumnya juga terjadi sengketa perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Untungnya setelah dihalau oleh kapal-kapal perang TNI-AL, mereka akhirnya pergi meninggalkan perairan tersebut. Perairan dan pulau-pulau tersebut sekaligus merupakan batas wilayah RI terluar dengan Malaysia dan sekitarnya.



Gambar 1.8 Pamer kekuatan TNI, menyongsong ancaman dengan kesiagaan.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Tugas TNI bertambah lagi, terutama untuk menjaga wilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain. Misalnya, beberapa waktu lalu sedang terjadi krisis keamanan atau pergolakan di negara tetangga kita yang baru memisahkan diri dari NKRI, yaitu Timor Timur. Kerusuhan tersebut dipicu oleh penolakan atas pemecatan beberapa perwira tinggi angkatan bersenjata di sana. Akibatnya, warga sipil yang terkena imbas dari bentrokan antara tentara perlawanan dengan aparat keamanan banyak melakukan eksodus (keluar dari tempat yang tidak aman) melewati perbatasan negara Indonesia dan Timor Timur di Atambua. Melihat kondisi seperti itu, aparat

TNI terus berjaga-jaga di sekitar Atambua, NTT sebagai antisipasi masuknya para perusuh dari Timor Timur ke wilayah Indonesia. Tidak kalah pentingnya untuk diwaspadai oleh jajaran TNI ialah pernyataan pemerintah dan parlemen Australia yang menyebut-nyebut Indonesia sebagai ancaman serius terhadap wilayah Australia.

Dibanding dengan agresi militer Amerika Serikat terhadap Irak dan Afghanistan, serta Israel terhadap Palestina, ancaman dari luar terhadap NKRI memang belumlah terlalu berat. Akan tetapi, sikap waspada dan siaga tetap perlu dilakukan oleh TNI dan Polri hal itu karena ancaman dapat berwujud dua, yaitu bisa secara terang-terangan dan frontal, tetapi bisa juga dilakukan secara diam-diam melalui berbagai gerakan penyusupan melalui oknum, lembaga-lembaga, LSM, partai politik, dan lain-lain.

Pemerintah perlu segera membangun kekuatan militer yang tangguh dan profesional yang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan canggih. Kekuatan militer Indonesia sangat dibutuhkan selain untuk menjaga kedaulatan NKRI, juga agar tercapainya stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai pemimpin kawasan dan selalu menjadi tolak ukur stabilitas keamanan. Jika di Indonesia aman dan stabil maka di kawasan Asia Tenggara pun stabil. Sebaliknya, jika di Indonesia tidak stabil atau mengalami instabilitas politik dan keamanan maka dampaknya akan terasa sampai ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

B. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara

Pembelaan negara harus menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Usaha-usaha pembelaan negara yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban (Polri) serta aparat pertahanan negara (TNI) di satu sisi dengan rakyat di pihak lain telah dilakukan bersama-sama sejak masa perjuangan kemerdekaan dulu. TNI dengan dibantu rakyat, berjuang bersama mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Rakyat juga turut membantu TNI pada masa konsolidasi organisasi TNI dan dalam menghadapi gerakan separatis di beberapa daerah pasca kemerdekaan. Puncaknya adalah ketika melakukan perlawanan yang gigih dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II periode 1945 sampai 1950-an, serta menghadapi percobaan kudeta atas Presiden Soekarno oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 dan 30 September 1965. Oleh karena itu, baik TNI maupun rakyat sama-sama sangat berjasa dalam membela negara. TNI dan rakyat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga muncul istilah manunggal TNI-rakyat.



Gambar 1.9 Aparat TNI sedang menolong korban tsunami, bekerja dengan nurani kemanusiaan.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Selama masa Orde Baru, TNI (waktu itu masih bernama ABRI) pun tidak segan-segan turun tangan membantu rakyat melalui Program ABRI Masuk Desa (AMD). Dengan Program AMD tersebut, para prajurit ABRI membantu masyarakat desa dalam membangun jembatan, rumah warga, dan tempat ibadah; melakukan gerakan kebersihan; membantu warga yang tertimpa musibah dan bencana alam, dan kegiatan pembangunan lainnya. Kegiatan-kegiatan perbantuan pada masyarakat tersebut terus berlangsung sampai sekarang.

Usaha-usaha pembelaan negara dapat dilakukan melalui institusi TNI ataupun dilakukan oleh rakyat secara mandiri. Model pembelaan negara melalui lembaga TNI dapat dilakukan setiap waktu karena hal itu sudah merupakan tugas/pekerjaan mereka. Setiap prajurit TNI selalu siap sedia untuk ditempatkan di mana pun termasuk di area pertempuran yang bergolak demi membela NKRI. Mereka rela berkorban meninggalkan keluarga dan orang-orang yang dicintainya bahkan nyawa sekalipun dalam kurun waktu yang tidak menentu demi tugas negara.



Gambar 1.10 Warga yang sedang Siskamling, menjaga keamanan secara mandiri.

Sumber: Repro Image Bank

Sementara itu, bela negara yang dilakukan secara mandiri dapat dilakukan oleh seluruh rakyat. Wujud bela negara yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah berupa sistem Pengaman Lingkungan (Siskamling). Cara ini merupakan salah satu bentuk dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata). Dengan situasi tindak kejahatan yang terus meningkat dewasa ini, program siskamling dapat efektif mencegahnya. Kerawanan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran, serta tingkat kebutuhan hidup yang terus meningkat, merupakan faktor penyebab semakin meningkatnya tingkat kejahatan.

Masyarakat bersama aparat desa harus mengantisipasi kecenderungan atau gejala kejahatan seoptimal mungkin dengan cara memperketat tingkat pengamanan melalui siskamling. Pendirian pos-pos siskamling di lingkungan setempat merupakan cara yang efektif untuk mencegah tindak kriminal terutama yang dilakukan dengan cara kekerasan. Selain itu, pengamanan lingkungan dengan siskamling ini juga dapat menjadi salah satu pembelajaran penegakan/supremasi hukum di kalangan masyarakat. Hal itu dapat mencegah tindakan main hakim sendiri yang sampai sekarang masih sering terjadi.

Siskamling sebenarnya merupakan sistem pengamanan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri. Siskamling juga dapat menjadi sistem keamanan dan ketertiban alternatif untuk bela negara. Sistem ini dapat berfungsi untuk mengisi kekurangan aparat kepolisian yang jumlahnya masih terbatas untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Jadi, bela negara membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

C. Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara

Dewasa ini, pada saat tindak kejahatan terus meningkat, kegiatan siskamling masyarakat tampaknya justru menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. Mengapa demikian? Memang tidak ada alasan yang jelas mengenai hal itu. Akan tetapi, barangkali karena bersifat sukarela, masyarakat juga tidak terlalu bersemangat mengadakan kegiatan ronda malam atau siskamling. Selain itu, barangkali juga disebabkan elemen tertentu dalam masyarakat sudah bosan dengan militerisme yang diterapkan sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto dulu.



Gambar 1.11 Paskibra, siap membela negara dengan prestasi.

Sumber: Repro Image Bank

Salah satu bentuk militerisme yang banyak dikritik beberapa tokoh masyarakat adalah keberadaan Kodim (Komando Distrik Militer). Citra Kodim saat itu relatif buruk karena Kodim dinilai merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Mereka digunakan untuk memata-matai seseorang atau organisasi masyarakat yang dicurigai menentang dan berlawanan dengan sikap pemerintah. Oleh para aktivis HAM, Kodim ketika itu dinilai telah melakukan berbagai pelanggaran HAM, seperti penculikan dan penghilangan para aktivis HAM. Mereka diduga melakukan pembunuhan warga sipil di Aceh dan Timor Timur (ketika itu Timor Timur masih menjadi Provinsi Indonesia ke-27). Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto dan masuknya Indonesia pada zaman reformasi, desakan yang menuntut pembubaran Kodim di setiap provinsi semakin kencang.

Peran serta masyarakat dalam bela negara selama ini masih relatif terbatas. Jalur formal bela negara melalui lembaga Polri dan TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) tetap dilakukan secara berkesinambungan. Mabes Polri dan Mabes TNI sampai sekarang secara berkala menerima calon-calon perwira maupun tamtama.

Perlu diketahui bahwa bela negara merupakan bagian dari nasionalisme atau cinta Tanah Air. Di dalam ideologi Pancasila, cinta Tanah Air tercantum dalam butir-butir Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selama ini bela negara identik dengan pengabdian warga yang terpilih dalam kaitannya dengan kekuatan militer yang dimiliki suatu negara. Apabila kamu turut secara aktif dalam program Siskamling, berarti kamu telah ikut serta membela negara dan cinta pada Tanah Air.

Sudah seharusnya, jika negara kita diserang secara fisik oleh negara lain, dimata-matai, dan diintervensi, seluruh rakyat wajib turut serta membela negara. Kasus intervensi yang menimpa Irak, Afghanistan, Palestina oleh Amerika Serikat, Israel, dan negara sekutunya harus dikutuk habis-habisan dan tidak boleh terjadi di Indonesia.

Intervensi dapat terjadi pada negara manapun di dunia ini. Terlebih lagi Amerika Serikat dewasa ini tidak memiliki lagi kekuatan pengimbang, seperti halnya dulu ketika Uni Soviet masih berdiri. Amerika Serikat kini lebih banyak berperan sebagai 'polisi dunia' yang setiap waktu dapat menangkap dan mengadili pemimpin negara lain/rezim yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingannya tanpa melalui Mahkamah Internasional. Mereka tidak segan-segan menghancurkan negara lain dengan kekuatan militernya yang super canggih. Padahal, intervensi suatu negara terhadap negara lain jelas-jelas tidak dibenarkan. Hal itu bertentangan dengan Piagam PBB, HAM, dan Undang-Undang Dasar 1945.



Gambar 1.12 Membela negara sampai titik darah penghabisan melawan agresor Israel adalah demi keadilan.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Peran serta rakyat dalam bela negara harus terus-menerus dipersiapkan. Usaha itu dapat dilakukan melalui program rutin maupun program yang bersifat tentatif, yaitu hanya untuk keperluan tertentu dan bersifat sementara. Peran serta pelajar dalam bela negara juga harus ditumbuhkan sejak dini. Tindakan bela negara juga dapat dilakukan, misalnya menjaga nama baik sekolah masing-masing dan mematuhi tata tertib sekolah.

RANGKUMAN

1. Negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di wilayah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
2. Bela negara bertujuan untuk mengamankan kedaulatan NKRI dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.
3. Potensi ancaman dari dalam negeri dapat berwujud upaya sekelompok masyarakat yang menginginkan terjadinya disintegrasi bangsa dan terorisme.
4. Ancaman terhadap kedaulatan NKRI yang datang dari luar misalnya sebagai berikut.
 - a. Bahaya perang nuklir yang sangat mudah membumi hanguskan manusia dan alam semesta termasuk di dalamnya negara Indonesia.
 - b. Keinginan negara besar untuk mencaplok wilayah Indonesia karena letak wilayah Indonesia yang strategis.
 - c. Keinginan negara-negara industri untuk menguasai kekayaan alam Indonesia yang melimpah.
 - d. Arus globalisasi yang menimbulkan dampak buruk pada seluruh aspek kehidupan.
5. Bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat.
6. Bela negara tidak hanya dapat dilakukan oleh rakyat dalam bidang militer atau pertahanan keamanan, tetapi juga seluruh bidang kehidupan, seperti bidang teknologi, kesenian, dan olahraga.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Kata *staat* dalam istilah *bela negara* berasal dari bahasa
 - a. Latin
 - b. Prancis
 - c. Inggris
 - d. Belanda dan Jerman
2. Adanya rakyat merupakan salah satu syarat ... negara.
 - a. fungsi
 - b. terbentuknya
 - c. tujuan
 - d. landasan
3. Penghuni suatu negara disebut
 - a. rakyat
 - b. warga negara
 - c. masyarakat
 - d. penduduk
4. Pembelaan negara secara konstitusional sudah tercantum dalam UUD 1945, yaitu dalam
 - a. pasal 30 (5)
 - b. pasal 27 (1)
 - c. pasal 27 (2)
 - d. pasal 27 (3)
5. Berikut ini yang termasuk komponen pendukung dalam pembelaan negara adalah
 - a. TNI-AL
 - b. Hansip
 - c. TNI-AD
 - d. TNI-AU
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 mengatur tentang
 - a. Kepolisian Negara RI
 - b. Pertahanan Negara
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - d. Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI
7. Daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut teritorial sedalam 200 meter atau lebih disebut
 - a. Zona Ekonomi Eksklusif
 - b. Laut Dalam
 - c. Landas Benua
 - d. Laut Teritorial
8. Secara *de jure* negara Indonesia mulai diakui oleh masyarakat internasional pada tanggal
 - a. 17 Agustus 1945
 - b. 17 Desember 1949
 - c. 18 Agustus 1945
 - d. 17 Agustus 1950

9. Negara adalah alat atau wewenang yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
 - a. Ir. Soekarno
 - b. Mac Iver
 - c. Moh. Hatta
 - d. Roger H. Soltau
10. Berikut ini yang termasuk unsur deklaratif sebagai syarat terbentuknya suatu negara adalah
 - a. rakyat
 - b. wilayah
 - c. pemerintahan yang berdaulat
 - d. pengakuan negara lain
11. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 mengatur tentang
 - a. Perairan Indonesia
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif
 - c. Pertahanan Negara
 - d. Pembelaan Negara
12. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat di dalam ... UUD 1945.
 - a. pasal 30 ayat 1
 - b. pasal 30 ayat 2
 - c. pasal 30 ayat 3
 - d. pasal 27 ayat 3

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa pembelaan negara dianggap penting?
2. Apakah pembelaan negara hanya dapat dilakukan dalam bidang militer?
3. Apayangmenjadifaktorpenyebabrawannyanegarakitadariancamanpadapasca kemerdekaan periode 1945 – 1965?
4. Mengapanegara-negarabesardannegara-negaraindustridapatmenjadiancaman potensial terhadap keamanan dan kedaulatan negara kita?
5. Upaya-upayaapasajayangdapatdilakukanolehrakyatmaupunpemerintahuntuk menghindarkan negara kita dari berbagai ancaman militer maupun ideologi dan budaya?



TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Ketatanegaraan! Salinlah di buku tugas kalian!

Negara	:
Rakyat	:
Penduduk	:
Wilayah	:
Teror	:
Terorisme	:
Separatisme	:
Disintegrasi	:
Oknum	:
Intervensi	:
Rezim	:
Ideologi	:
Travel Warning	:
Partisipasi	:
Eksodus	:



KEGIATAN

Buatlah tulisan atau karangan dengan tema “Bela Negara, Negaraku Aman”. Berilah Judul secara bebas. Tulisan ditulis dalam 2-3 halaman kwarto spasi dua. Setelah selesai, kumpulkan kepada gurumu untuk dinilai!

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah (Otda) telah digulirkan pemerintah pada tahun 2001 lalu. Telah banyak kemajuan yang dicapai pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia setelah digulirkannya Otda ini. Misalnya, munculnya beberapa wilayah kabupaten, kota, dan provinsi hasil dari pemekaran wilayah telah berdiri. Selain itu, bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah terasa lebih adil. Pengelolaan dana pemerintah daerahpun dilakukan secara mandiri, baik melalui DAU (Dana Alokasi Umum) maupun DAK (Dana Alokasi Khusus). Apa sebenarnya yang dimaksud otonomi daerah (Otda) itu? Mengapa Otda diidam-idamkan oleh pemerintah daerah? Berhasilkah penerapan Otda ini atau sebaliknya? Simak jawabannya dengan saksama dalam Bab 2 ini.

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa diharapkan mampu menggambarkan pengertian otonomi daerah.
2. Siswa mampu menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.



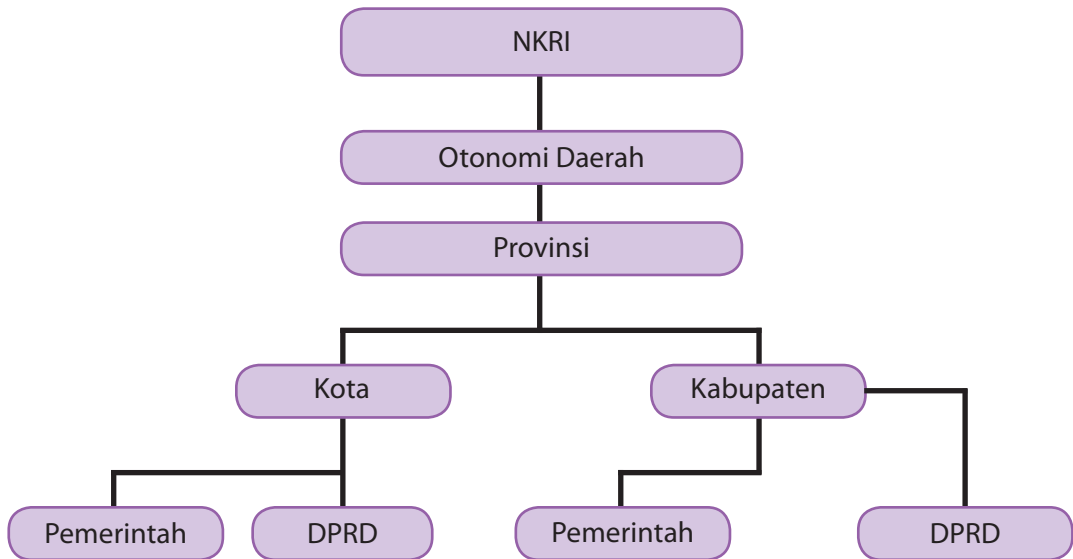
Gambar 2.1 Partisipasi warga negara dalam bela negara dapat disalurkan melalui institusi kepolisian.

Sumber: www.kompas.com/bermedia.com

Kata Penting

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| - Otonomi | - Pemerintah pusat | - Pemerintah daerah |
| - Wewenang otonomi | - Kepala daerah | - Desentralisasi |
| - DPRD | - Dekonsentrasi | |

PETA KONSEP



Dalam tata pemerintahan modern, kekuasaan tidak berada di tangan satu orang atau satu lembaga secara terpusat (sentralistik). Akan tetapi, kekuasaan pemerintahan didelegasikan ke banyak lembaga atau institusi lain yang sejajar atau lebih rendah kedudukannya. Pendelegasian itu dapat secara desentralisasi, dekonsentrasi, melalui tugas pembantuan, maupun secara otonomi. Tujuan dari pembagian wewenang atau pendelegasian tersebut jelas, yaitu untuk meringankan dan melancarkan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Hal itu karena pemerintah pusat tidak mungkin mampu mengelola pemerintahannya secara sendirian.

Asas desentralisasi berarti membagi dan menyebarkan kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan organ-organ (dinas-dinas) yang ada di daerah. Dengan asas desentralisasi, sebagian urusan pemerintah pusat dijalankan oleh pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya wewenang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan daerahnya sendiri.

Adanya istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa dalam sistem desentralisasi, kekuasaan negara berjenjang atau berstruktur dari atas ke bawah (vertikal). Di Indonesia, struktur yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten yang memiliki otonomi. Di bawah kabupaten/kota terdapat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pada masa Orde Baru konsep desentralisasi tidak berjalan mulus karena pemerintah pusat tetap mengendalikan daerah pada hampir seluruh aspek pemerintahan. Misalnya penentuan kepala daerah, penentuan anggaran, penentuan proyek, dan lain-lain. Jadi, daerah hanya berperan sebagai pelaksana seluruh kebijakan pemerintah pusat sehingga daerah hampir tidak berprakarsa sama sekali.

Jatuhnya rezim Orde Baru, mendorong masyarakat sadar akan arti demokrasi. Masyarakat menuntut hak untuk mendapat kesejahteraan yang lebih baik, dan kesadaran untuk berkarya lebih baik bagi daerahnya sendiri. Pada akhirnya mereka menuntut diberlakukannya otonomi daerah.

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Latin, yaitu diambil dari kata *auto* (sendiri) dan *nomos* (aturan), sehingga otonomi berarti pengaturan sendiri. Jadi, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Ringkasnya, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi daerah tidak berarti memutuskan sama sekali hubungan dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri dalam bidang tertentu saja. Jadi, otonomi daerah tidak merupakan kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang terbatas. Kewenangan pemerintah daerah, di antaranya sebagai berikut.

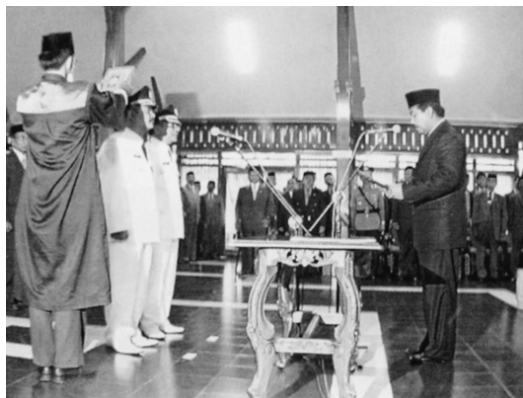
1. mengatur organisasi dan lingkungannya;
2. menyelenggarakan urusan-urusan tertentu dari kekuasaan pemerintahan dan pembangunan;
3. mengangkat pemimpin dan pejabat daerah;
4. menarik dan mengelola sumber keuangan daerah.

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada UUD 1945 Pasal 18, yaitu sebagai berikut.

1. Ayat (1) "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".
2. Ayat (2) "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Ayat (3) "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Ayat (4) "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Ayat (5) "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat"
6. Ayat (6) "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"
7. Ayat (7) "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada daerah secara proporsional. Pelaksanaannya diwujudkan dengan pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.



Gambar 2.2 Upacara pelantikan salah seorang pejabat pemerintah, mengukuhkan otonomi daerah.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaannya mengedepankan peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, perlu didorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pembagian daerah otonom terdiri atas daerah kabupaten dan kota, yang memiliki kedudukan sebagai daerah otonomi. Daerah ini mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Provinsi sebagai daerah otonom juga memiliki kedudukan sebagai wilayah administrasi, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.
3. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

Otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di semua bidang, di luar bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat. Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.



Gambar 2.3 Kendaraan bermotor di jalan bisa menghasilkan retribusi sebagai sumber dana pendapatan daerah.

Sumber: Repro Image Bank

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, tidak semua kewenangan pemerintahan pusat diserahkan pada daerah. Ada beberapa kewenangan yang tetap diatur oleh pusat. Di antaranya kewenangan otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Tujuan dan maksud pemberian otonomi adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri. Hal itu didukung oleh pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Penyelenggara pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat adalah wilayah desa. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi juga sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.

1. Pembagian Daerah

Pembagian daerah menurut pasal 18 UUD 1945, dilaksanakan berdasarkan atas asas berikut.

- a. Dekonsentrasi, yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
- b. Desentralisasi yakni penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Daerah otonom yang menyelenggarakan desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota. Daerah ini berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- d. Pembantuan ialah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.



CAKRAWALA

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam pembagian daerah digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
2. Daerah provinsi menyelenggarakan dekonsentrasi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
3. Daerah kota atau kabupaten menyelenggarakan desentralisasi secara utuh dan bulat di daerah.
4. Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa.

2. Susunan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah terdiri atas lembaga-lembaga berikut.

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah.
- b. Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota

1) Keanggotaan DPRD

- a) Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
- b) Beranggotakan sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya seratus orang untuk DPRD provinsi, serta sekurang-kurangnya 25 orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang untuk DPRD kabupaten/kota.
- c) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama presiden, dan berdasarkan keputusan gubernur atas nama presiden untuk anggota DPRD kabupaten/kota.
- d) Domisili anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota di ibu kota provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan.
- e) Masa jabatan keanggotaan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

2) Fungsi DPRD

- a) Legislasi
- b) Anggaran
- c) Pengawasan

3) Tugas dan wewenang DPRD

- a) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur bupati/wali kota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) Menetapkan APBD bersama dengan gubernur, bupati/wali kota;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - (1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan,
 - (2) pelaksanaan keputusan gubernur, bupati/wali kota,
 - (3) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
 - (4) kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan,
 - (5) pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

- d) DPRD provinsi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur, kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. DPRD kabupaten/kota mengusulkan pengangkatan bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- e) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur, bupati/wali kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

4) Hak DPRD



Gambar 2.4 Suasana dengar pendapat di DPR.

Sumber: www.kompascybermedia.com

- a) Hak interpelasi, yaitu hak meminta keterangan,
 - b) Hak angket, hak mengadakan penyelidikan,
 - c) Hak menyatakan pendapat.
- 5) Anggota DPRD mempunyai hak sebagai berikut.
- a) Mengajukan rancangan peraturan daerah.
 - b) Mengajukan pertanyaan.

- c) Menyampaikan usul dan pendapat.
 - d) Memilih dan dipilih.
 - e) Membela diri.
 - f) Imunitas.
 - g) Protokol.
 - h) Keuangan dan administratif.
- 6) Kewajiban anggota DPRD
- a) Mengamalkan Pancasila.
 - b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
 - c) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - d) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah.

- e) Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- f) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- g) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- h) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
- i) Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten/kota.
- j) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

b. Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh wakil kepala daerah.



Gambar 2.5 Suasana dengar pendapat di DPRD.

Sumber: www.kompascybermedia.com

1) Kepala Daerah Tingkat Provinsi

- a) Kepala daerah di tingkat provinsi disebut gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil pemerintah.
- b) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi.
- c) Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

2) Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota

- a) Kepala daerah kabupaten disebut bupati
- b) Kepala daerah kota disebut wali kota
- c) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah bupati/wali kota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota.

c. Perangkat Daerah

Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, sebuah kabupaten/kota terbagi menjadi beberapa wilayah di bawahnya.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh camat. Camat diangkat oleh bupati/wali kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/wali kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, camat bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan, yang dipimpin oleh seorang lurah. Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Lurah bertugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan camat kepadanya, karena itu ia bertanggung jawab kepada camat.

Desa atau yang di daerah tertentu disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.



Gambar 2.6 Aktivitas masyarakat di sebuah desa, perlu momentum menyejahterakan mereka.

Sumber: Repro Image Bank

Ciri utama desa adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian. Termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa, atau yang di daerah tertentu disebut dengan nama lain. Badan ini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal

pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Selain itu di desa juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini didasari oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan UU tersebut berarti pemerintah telah memberikan dorongan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran serta dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 mendasari daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan otonomi daerah secara utuh. Daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah juga secara langsung merupakan perwujudan dari kehendak demokrasi yang sudah menjadi tuntutan masyarakat madani dewasa ini. Perhatikan ciri-ciri negara demokrasi berikut ini.

1. Adanya pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat dalam pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan memerhatikan keanekaragaman daerah.

1. Prinsip Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi dominan. Peran serta masyarakat di antaranya adalah partisipasi dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak legislatif sebagai wakil rakyat dengan pihak eksekutif atau pemegang kekuasaan pemerintahan. Adanya kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, dan peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh eksekutif, bersumber pada adanya masalah yang timbul di lingkungan masyarakat. Masalah

ini kemudian diangkat dalam bentuk wacana yang didiskusikan oleh para tokoh masyarakat, atau muncul dalam bentuk opini di media massa. Masyarakat kemudian berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan menawarkan solusi pemecahan masalah kepada pemerintah, dan meyakinkan pemerintah untuk menerima solusi tersebut. Apabila solusi yang ditawarkan oleh masyarakat diterima oleh pemerintah dan disetujui oleh wakil rakyat, kemudian dibuatlah kebijakan publik. Kebijakan mengatur kehidupan masyarakat untuk mengatasi masalah sebelumnya.

Apabila kebijakan publik atau peraturan perundangan telah dibuat, maka seluruh masyarakat harus melaksanakan kebijakan publik itu dengan penuh tanggung jawab. Hal itu karena sifat dari kebijakan publik adalah mengikat seluruh anggota masyarakat.

Setiap warga negara dapat berperan dalam memengaruhi pemerintah atau lembaga legislatif, untuk mengambil keputusan dengan berbagai cara. Misalnya, melalui pertemuan dalam bentuk dialog pendapat antara masyarakat dengan pemerintah atau wakil rakyat, yang sengaja datang ke daerah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

2. Peran Serta Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Dampak dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Pada masa lalu pelaksanaan pembangunan dan sebagainya dilaksanakan dengan cara top down. Artinya, segala sesuatu bergantung kebijakan pemerintah pusat. Memasuki otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan dan sebagainya dilaksanakan secara bottom up. Artinya, pemerintah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikut serta merencanakan, menentukan, dan mengambil keputusan serta mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut.

Masyarakat dapat ikut serta dalam perencanaan, pembahasan serta pengambilan keputusan, melalui berbagai cara, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menyampaikan secara langsung usul, saran, atau masukan kepada lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerahnya, kepada DPRD kota/kabupaten atau provinsi, atau kepada Badan Permusyawaratan Desa apabila berada di desa.

- b. Menulis di surat kabar, baik dalam bentuk opini, surat pembaca, komentar, atau lainnya.
- c. Memberikan komentar-komentar melalui media televisi atau radio. Dengan demikian usul, saran, atau komentar dapat didengar oleh para wakil rakyat yang berhak membentuk kebijakan publik, serta oleh masyarakat lainnya.



Gambar 2.7 Unjuk rasa warga di sebuah provinsi di depan kantor pemerintah/DPRD.

Sumber: Repro Image Bank

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan dan menentukan kebijakan negara maupun daerah yang menyangkut kepentingan umum. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa yang menjadi hak yang dijamin serta dilindungi oleh negara serta kewajiban apa yang harus dilakukan serta dituntut oleh negara. Hal itu hanya dapat kita ketahui jika kita selalu belajar dengan baik, sehingga pengetahuan kita menjadi banyak. Kita pun dapat menentukan sikap dalam pergaulan hidup di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai makhluk sosial, manusia saling berkomunikasi, berinteraksi satu dengan lainnya. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Manusia selalu berusaha agar hidupnya terasa tenteram, nyaman, tertib, dan teratur. Namun dalam kenyataannya, manusia sering berusaha mencari atau menggunakan jalan pintas agar kebutuhannya mudah terpenuhi. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan cara-cara yang tidak wajar, yang penting kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Prinsip dasar otonomi daerah tersebut adalah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Diberlakukannya undang-undang ini, menggambarkan pelaksanaan dari kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini memiliki kekuasaan untuk menentukan kehendaknya. Karena itu, rakyat wajib berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Apabila rakyat tidak aktif dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik yang mengatur kehidupan dirinya, maka arti demokrasi di Indonesia menjadi tidak ada. Sementara itu pemerintah yang ditugasi untuk membawa bangsa dan negara ini menuju masyarakat yang adil

dan makmur, tidak akan berjalan sebagai mana mestinya. Kemungkinan yang terjadi adalah penguasa akan menjalankan pemerintahan dengan sekehendak hatinya dan menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Masukan dan kritik dari masyarakat tidak ada lagi dan masyarakat bersikap masa bodoh. Dengan demikian negara yang diharapkan dan dicita-citakan tidak akan tercapai.

Sementara itu tantangan yang dihadapi negara bukan saja datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kita harus menyadari bahwa negara Indonesia memiliki kekayaan alam atau sumber daya alam yang melimpah. Kita juga memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Apabila potensi yang ada ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya maka sumber daya yang kita miliki akan dikuasai oleh bangsa asing yang memiliki kemampuan lebih baik dari bangsa Indonesia.

Kita sebagai bangsa Indonesia yang menyadari keadaan itu harus selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik serta pelaksanaannya. Kita harus mampu menyumbangkan semua kemampuan kita untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Pemerintah dan wakil rakyat harus selalu mendengar masukan dan saran dari warga masyarakat dalam melaksanakan semua kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki di kalangan masyarakat, serta ada rasa tanggung jawab untuk mengamankan serta menjaga kelestariannya. Selain itu, masyarakat yang turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan akan selalu menjaga dan memelihara semua hasil pembangunan. Hal itu karena ia merasa bahwa semua itu adalah miliknya.

Masyarakat dapat menyampaikan usul, saran, serta masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau melalui wakil rakyat dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut.

- a. Secara langsung berhadapan dengan para wakil rakyat, atau pejabat pemerintah, kemudian melakukan audiensi dan menyampaikan saran atau kritik yang menjadi kehendaknya.
- b. Menggunakan media cetak, misalnya melalui surat kabar, majalah, atau tabloid. Masyarakat dapat membuat surat pembaca atau opini tentang masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Masyarakat juga dapat memberikan komentar terhadap masalah yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dijadikan sebagai peraturan perundangan atau peraturan daerah.
- c. Menyampaikan pendapat melalui seminar, atau lokakarya yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, atau lembaga kemasyarakatan.

- d. Menyampaikan saran dan masukan kepada orang yang menjadi narasumber tentang kebijakan publik tersebut.
- e. Selalu melakukan monitoring terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh dirinya atau usulan yang disampaikan orang lain.
- f. Bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau ORNOP (organisasi nonpemerintah). Kemudian membuat pernyataan atau usulan serta saran untuk disampaikan kepada pemerintah.
- g. Melakukan aksi demonstrasi baik untuk menentang atau mendukung rencana pembentukan kebijakan publik yang akan, sedang atau telah dibicarakan oleh para wakil rakyat di DPR/DPRD. Dengan begitu warga negara lainnya memiliki keyakinan untuk menolak atau mendukung usulan yang sedang dibicarakan tersebut.
- h. Melakukan penelitian atas suatu masalah yang ada. Hasil penelitian itu kemudian dijadikan bahan untuk memberikan masukan, saran atau kritik atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, secara komprehensif sebagai hukum positif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Asas desentralisasi dilaksanakan secara penuh di kabupaten/kota dan secara terbatas di provinsi, sedangkan asas dekonsentrasi hanya dilaksanakan di provinsi. Adapun tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Asas ini dilaksanakan di provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Kabupaten/kota memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah untuk menentukan besaran organisasi, jumlah personil, APBD, serta jumlah dan jenis pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan bentuk kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang memiliki kedaulatan di daerahnya.

Dengan berlakunya undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut, pola pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah mengalami perubahan. Pola pertanggungjawabannya berubah dari pertanggungjawaban secara hierarkis kepada pemerintah yang ada di atasnya, menjadi ke samping yakni kepada rakyat melalui para wakilnya di DPRD. Selain itu rakyat dapat secara langsung mengawasi jalannya pemerintahan daerah, atau melalui para wakilnya yang disertai mandat untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Sumber keuangan yang selama ini dikelola pemerintah pusat, sekarang dilakukan pembagian secara adil melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang

mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagiannya secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memerhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada kebebasan daerah untuk menggunakan haknya. Di antara hak tersebut adalah memilih pemimpinnya sendiri, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber keuangannya sendiri, membuat aturan atau hukum sendiri, serta memiliki pegawainya. Kebebasan tersebut dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum, serta asas kepatuhan.

Berkaitan dengan ketahanan nasional, pelaksanaan otonomi daerah juga baik. Masalah yang timbul di daerah mulai dapat diselesaikan oleh masyarakat di daerah tersebut. Hal ini sangat menguntungkan, karena masalah di daerah tidak meluas menjadi masalah nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki kekurangan atau kelemahan sebagai berikut.

- a. Menguatnya rasa kedaerahan yang sempit. Apabila keadaan ini tidak diantisipasi secara tepat akan bersifat kontraproduktif terhadap upaya pembangunan wawasan kebangsaan. Hal ini tampak dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di daerah, kesempatan berusaha, penyusunan rencana pembangunan, pemberian layanan umum, maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan akan jabatan birokrasi di daerah.
- b. Penghimpunan pendapatan daerah untuk membiayai pemerintahan dan program-program pembangunan. Efek negatif dari pembangunan yang tidak terkontrol adalah munculnya gejala ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Selain itu, juga dapat terjadi pengabaian kelestarian lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terencana dengan baik.
- c. Pemahaman terhadap otonomi daerah yang sempit, mengakibatkan kesibukan hanya ada pada pemerintah daerah, sedangkan masyarakat belum dilibatkan secara aktif. Padahal otonomi daerah diserahkan pada masyarakat umum, bukan kepada pemerintah daerah semata. Hal ini terlihat pada penggunaan dana APBD lebih banyak digunakan untuk kepentingan birokrasi dan DPRD daripada kepentingan masyarakat.
- d. Adanya pemahaman dan penafsiran yang salah terhadap otonomi daerah secara luas, utuh, dan bulat. Hal ini terbukti dengan banyaknya penafsiran sepihak terhadap berbagai peraturan perundangan yang

diterbitkan oleh pemerintah pusat. Padahal, demokrasi membutuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi. Demokrasi tanpa penegakan hukum akan menimbulkan anarki dan menimbulkan ketidakpastian hukum.



Gambar 2.8 Penebangan liar dilakukan secara sistematis, sebuah persoalan otonomi daerah.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Pemerintah dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadaannya seperti dua sisi yang berbeda pada satu mata uang yang sama. Satu sama lain tidak dapat dilepaskan dan melepaskan dirinya. Pemerintah dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat terbentuk kelompok yang mengatur dan mengurus kepentingan dirinya, serta berusaha untuk mempertahankan dirinya dari kekuatan lain. Hal inilah yang kemudian menjadi embrio dari pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki tata pemerintahan yang baik, harus memiliki ciri-ciri, di antaranya sebagai berikut.

- a. Mengikutsertakan semua elemen masyarakat. Warga masyarakat di negara demokrasi adalah pemilik kedaulatan. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga yang menjadi mediator warga negara, seperti DPRD, LSM, dan lainnya. Partisipasi dapat dilakukan dengan cara menyampaikan buah pikiran, bantuan dana, bantuan tenaga, maupun bentuk lain yang dianggap bermanfaat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan mulai dari perencanaan penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Syarat utama warga negara dalam berpartisipasi, di antaranya:
 - 1) bersifat sukarela atau tanpa paksaan;
 - 2) adanya keterlibatan secara emosional;
 - 3) merasakan dan memperoleh manfaat secara langsung atau tidak langsung dari keterlibatannya.
- b. Transparan dan bertanggung jawab. Saat ini pemerintahan dituntut untuk terbuka, yang mencakup semua aspek aktivitas kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahap evaluasi. Selain itu setiap aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan dan aktivitas publik, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, tanggung gugat dan tanggung jawab bukan hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga harus dapat diberikan kepada masyarakat luas.

- c. Efektif dan adil. Hal ini diperlukan agar kita memiliki kemampuan bersaing dengan masyarakat lainnya secara global, sehingga mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis. Tanpa adanya kompetisi maka efisiensi tidak akan tercapai. Setiap warga masyarakat juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing berbeda maka sektor publik harus menjamin kesejahteraan dan keadilan menjamin kehidupan masyarakatnya.



Gambar 2.9 Seorang pejabat daerah sedang disidang di pengadilan, menegakkan persamaan di depan hukum.

Sumber: www.kompascybermedia.com

- d. Menjamin adanya supremasi hukum. Salah satu sarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa melihat siapa yang melayani dan dilayani. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, bahkan yang muncul adalah anarki. Hal itu karena setiap orang cenderung melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya tanpa mengindahkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan dalam melaksanakan otonomi daerah adalah membangun sistem hukum yang

sehat. Termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- e. Menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan bermasyarakat harus bertumpu pada konsensus dan kesediaan untuk siap melaksanakan konsensus tersebut.
- f. Memerhatikan kepentingan masyarakat yang miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu berpihak kepada orang yang memiliki kemampuan cukup dan lebih. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan harus ditujukan dan berpihak pada kepentingan publik.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, selain desentralisasi dan dekonsentrasi, pemerintah Indonesia menyelenggarakan tugas pembantuan. Tugas ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah, untuk mengatasi dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai berikut.

- a. Bidang pertanian, diantaranya: membantu pelaksanaan penanggulangan wabah, hama, dan penyakit menular dalam bidang pertanian; membantu pelaksanaan penggunaan bibit unggul; membantu memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengaturan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota; membantu memberi informasi mengenai pengaturan penggunaan air irigasi; membantu memberi informasi mengenai pemantauan, perencanaan dan pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit dalam bidang pertanian.
- b. Bidang kehutanan dan perkebunan: membantu penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produktif dan hutan lindung; membantu penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota; membantu pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama pada tanaman pertanian dan perkebunan; membantu penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi sistem, budi daya dan pengelolaan; membantu penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota.
- c. Bidang kesehatan, membantu mengumpulkan dan memberi informasi untuk kegiatan pengawasan epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.
- d. Bidang pendidikan dan kebudayaan: membantu memberi informasi untuk bahan pembuatan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dana atau tidak mampu; membantu menyalurkan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- e. Bidang sosial, membantu mengumpulkan dan memberi informasi mengenai pemberian pelayanan sosial.
- f. Bidang penataan ruang; membantu mengumpulkan dan memberi informasi untuk bahan pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
- g. Bidang pekerjaan umum: membantu penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas kabupaten/kota.
- h. Membantu pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas kabupaten/kota beserta bangunan perlengkapannya; membantu menyediakan informasi untuk penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

- i. Bidang perhubungan; membantu pelaksanaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan (rambu-rambu) lalu lintas jalan provinsi, danau, dan sungai lintas kabupaten/kota.
- j. Bidang lingkungan hidup; membantu mengumpulkan informasi untuk pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.

RANGKUMAN

1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Dasar hukum otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari desentralisasi pemerintahan yang telah diberlakukan sejak Orde Baru. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tetap pemerintah pusat masih sangat dominan mengambil peran pemerintah daerah. Jadi, otonomi daerah sama sekali tidak memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat karena dalam beberapa bidang tertentu kewenangannya tetap berada di tangan pemerintah pusat, seperti wewenang dalam bidang keamanan dan pertahanan serta wewenang dalam melakukan politik dan hubungan luar negeri.
4. Otonomi daerah jika dijalankan secara benar dan profesional akan mempercepat kemandirian suatu daerah termasuk di dalamnya mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5. Dampak buruk pelaksanaan otonomi daerah yang tidak dijalankan dengan benar dan profesional, antara lain timbulnya orang-orang tertentu yang menguasai sumber-sumber ekonomi secara sepihak, pemerataan korupsi/korupsi berjamaah, eksploitasi sumber-sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab, dan lain-lain.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah disebut
 - a. delegasi
 - b. dekonsentrasi
 - c. desentralisasi
 - d. otonomi
2. Landasan hukum tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah
 - a. UU Nomor 20/1982
 - b. UU Nomor 27/1998
 - c. UU Nomor 21/1987
 - d. UU Nomor 25/1999
3. Anggota DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya berjumlah
 - a. 30 orang
 - b. 40 orang
 - c. 35 orang
 - d. 50 orang
4. Salah satu fungsi DPRD adalah legislasi, yaitu DPRD berwenang untuk membuat
 - a. peraturan perundang-undangan
 - b. anggaran
 - c. ketertiban
 - d. program pembangunan
5. Peraturan yang timbul dari budaya hidup manusia atau adat-istiadat disebut
 - a. norma hukum
 - b. norma kesopanan
 - c. norma kesusilaan
 - d. norma agama
6. Gubernur bertanggung jawab kepada
 - a. Presiden
 - b. MPR
 - c. DPR
 - d. DPRD Provinsi
7. Menyampaikan usul dan pendapat merupakan salah satu
 - a. tugas DPRD
 - b. wewenang DPRD
 - c. tugas DPRD
 - d. hak DPRD
8. Hak mengadakan penyelidikan disebut
 - a. hak inisiatif
 - b. hak angket
 - c. hak interpelasi
 - d. hak usul

9. Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama disebut kewenangan
 - a. otonomi luas
 - b. pemerintah daerah
 - c. otonomi khusus
 - d. pemerintah pusat
10. "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" adalah bunyi UUD 45
 - a. Pasal 17 (6)
 - b. Pasal 19 (6)
 - c. Pasal 18 (6)
 - d. Pasal 20 (6)

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa otonomi daerah perlu dilakukan?
2. Mengapa pelaksanaan desentralisasi pada masa Orde Baru dinilai gagal?
3. Apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan otonomi daerah?
4. Apakah menurut pendapatmu, otonomi daerah berpotensi melahirkan separatisme?
5. Mengapa wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) diberi otonomi khusus? Apa yang dimaksud otonomi khusus tersebut?
6. Apa perbedaan antara asas desentralisasi dan dekonsentrasi?
7. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Mengapa warga masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan publik dan bagaimana cara melaksanakannya. Jelaskan!
8. Mengapa supremasi hukum perlu dilakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah?



TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Administrasi Negara! Salinlah di buku tugas kalian!

Konstitusi	:
Hukum	:
Peraturan	:
Peraturan Pemerintah	:
Undang-Undang	:



KEGIATAN

Kunjungilah kantor desa/kelurahan di dekat tempat tinggalmu! Carilah informasi tentang pelaksanaan otonomi daerah dengan desa/kelurahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya. Hasil dari penulisan tersebut buat dalam bentuk tulisan. Jika telah selesai, serahkan laporan tersebut kepada gurumu untuk dinilai!



OPINI

Bacalah baik-baik informasi berikut ini!

“Pabrik Kertas Diduga Cemari Sungai Tulangbawang”

Sebuah pabrik kertas yang masih uji coba mengolah pulp dan membuat kertas, diduga mencemari Sungai Tulang Bawang yang ada di wilayah Lampung. Pabrik ini mengeluarkan limbah berwarna kehitaman yang sangat bau dan berbusa, yang dikenal dengan sebutan lindi hitam.

Pencemaran pabrik ini dilaporkan oleh PTP XXXI Bunga Mayang yang menjadi tetangga pabrik tersebut ke badan pengendali dampak lingkungan (BAPEDAL), karena khawatir pabriknya yang dituduh mencemari sungai. Staf BAPEDAL yang kemudian meninjau ke sana bulan Juli lalu memang menemukan adanya limbah kertas yang sama sekali belum diolah langsung dibuang ke anak Sungai Tulang Bawang, yaitu Sungai Sungkai.

Menurut Nabel Makarim, Deputi I BAPEDAL, yang ditemui wartawan di kantornya, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Pemda Lampung memerintahkan pabrik untuk tidak membuang limbah ke sungai, sampai membuat unit pengolahan limbah (UPL) yang memenuhi sarat baku mutu lingkungan.

Pendirian pabrik ini sendiri sebenarnya memang sudah tidak memenuhi syarat. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, seharusnya izin pendirian pabrik baru diberikan bila pabrik juga bersedia membangun UPL. Demikian pula saat pengoperasiannya harus memanfaatkan UPL yang ada, meskipun baru uji coba. Pada kenyataannya, pabrik berdiri dan bisa melakukan uji coba produksi meskipun tidak memiliki UPL. Padahal seperti diketahui, limbah pabrik kertas sangat berbahaya karena mengandung bahan beracun dan berbahaya. Sungai yang terkena limbah tersebut biasanya tidak lagi kaya ikan, tidak dapat dikonsumsi, dan bahkan untuk mandi pun menyebabkan gatal-gatal.

(Sumber : Lingkungan Hidup & Pembangunan dalam Era Globalisasi, 1993)

Bacalah wacana di atas dengan saksama! Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama teman-teman kalian!

1. Apa pokok masalah dari bacaan di atas?
2. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam bacaan di atas!
3. Adakah kebijakan publik yang diterbitkan untuk pendirian pabrik tersebut?
4. Apakah akibat yang muncul dari pendirian pabrik itu?
5. Kebijakan publik apa yang sebaiknya kalian usulkan untuk mengatasi masalah tersebut?
6. Jelaskan alasan usulan terhadap kebijakan publik tersebut!
7. Kepada siapa kebijakan publik itu diusulkan?

EVALUASI SEMESTER 1

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara merupakan bunyi UUD 45
 - a. Pasal 27 (3)
 - b. Pasal 29 (2)
 - c. Pasal 28 (1)
 - d. Pasal 30 (3)
2. Membagikan/menyebarkan kekuasaan dan kewenangan kepada daerah dan organ-organ/dinas-dinas di daerah disebut
 - a. otonomi
 - b. dekonsentrasi
 - c. desentralisasi
 - d. distribusi
3. Kebebasan, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan disebut juga... otonomi.
 - a. fungsi
 - b. nilai dasar
 - c. tugas
 - d. hakikat
4. Wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri disebut....
 - a. otonomi
 - b. dekonsentrasi
 - c. desentralisasi
 - d. distribusi
5. Negara adalah perkumpulan yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat wilayah tertentu dengan berdasar sistem hukum. Untuk maksud tersebut negara diberikan kekuasaan untuk memaksa. Pendapat tersebut di kemukakan oleh
 - a. Supomo
 - b. Roger H. Soltau
 - c. Muh. Yamin
 - d. Mac. Iver
6. Orang-orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dan memiliki kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tertentu disebut
 - a. penduduk
 - b. masyarakat
 - c. warga negara
 - d. rakyat
7. Negara kita mempunyai wilayah yang sangat luas. Luas daratannya mencapai
 - a. 1,3 juta km²
 - b. 1,5 juta km²
 - c. 1,7 juta km²
 - d. 1,9 juta km²
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah tentang
 - a. Otonomi Daerah
 - b. Kepolisian Negara
 - c. Pemerintah Daerah
 - d. TNI

9. Sebagian besar wilayah negara kita berupa perairan, yaitu
 - a. 8,3 juta km²
 - b. 8,5 juta km²
 - c. 8,7 juta km²
 - d. 8,9 juta km²
10. Secara de facto negara kita lahir pada
 - a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 28 Oktober 1928
 - d. 5 Juli 1959
11. Pada periode setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, lembaga yang ber-peran sebagai parlemen adalah
 - a. KNIP
 - b. MPRS
 - c. DPRS
 - d. PPKI
12. Resimen Mahasiswa (Menwa) termasuk salah satu komponen dalam pembelaan negara.
 - a. utama
 - b. pendukung
 - c. cadangan
 - d. tambahan
13. Kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah menyangkut bidang-bidang seperti berikut ini, kecuali
 - a. menyelenggarakan pendidikan
 - b. pelayanan pertanahan
 - c. mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
 - d. menyediakan sarana dan prasarana umum
14. Pembuatan peraturan desa kini dilakukan oleh lembaga yang bernama
 - a. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
 - b. LMD (Lembaga Masyarakat Desa)
 - c. Kepala Desa
 - d. Ketua RT dan RW setempat
15. APBD dan Perda (Peraturan Daerah) disusun bersama oleh
 - a. Bupati-Wali kota
 - b. DPRD-Kepala Daerah
 - c. Presiden-Gubernur
 - d. Gubernur-Wakil Gubernur
16. Termasuk unsur konstitutif dalam pembentukan suatu negara menurut Mahfud MD adalah
 - a. rakyat, negara, wilayah
 - b. rakyat, negara, pengakuan dari negara lain
 - c. rakyat, negara, wilayah, pengakuan dari negara lain
 - d. negara, wilayah, pengakuan dari negara lain

17. Ancaman terhadap NKRI yang datang dari dalam negeri contohnya adalah sebagai berikut, kecuali
 - a. PRRI/Permesta
 - b. Israel
 - c. PKI
 - d. GAM
18. Pada tanggal 18 Agustus 1945, negara Indonesia telah berdiri secara
 - a. de facto
 - b. lengkap
 - c. de jure
 - d. konstitusional
19. Perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diundangkan dalam
 - a. UUD 1945
 - b. UU No. 33/2004
 - c. UU No. 32/2004
 - d. UU No. 22/1999
20. Kota/kotamadya dipimpin oleh seorang
 - a. Gubernur
 - b. Camat
 - c. Bupati
 - d. Wali kota

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Jelaskan perbedaan antara desentralisasi dan otonomi daerah!
2. TNI dan Polri mempunyai tugas yang berbeda. Jelaskan!
3. Menurut pendapatmu, apakah pelaksanaan otonomi daerah sekarang sudah berjalan dengan baik? Jelaskan dan berikan contohnya!
4. Apa yang dimaksud DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan? Jelaskan dan berikan contohnya!
5. Sumbangkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada negara jika negara kita mendapat ancaman dari luar?

Globalisasi

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan pentingnya globalisasi bagi Indonesia.
2. Siswa berkemampuan menggambarkan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global.
3. Siswa mampu menggambarkan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Siswa mampu menentukan sikap terhadap dampak globalisasi.

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima oleh semua pihak. Tidak ada satu pihak pun yang dapat menahan proses globalisasi. Wujud dari globalisasi telah banyak dirasakan oleh bangsa Indonesia, seperti di bidang teknologi dan kebudayaan, terutama gaya hidup (life style). Dengan teknologi informasi, kita dapat menikmati internet setiap saat, melengkapi perangkat rumah tangga yang serba digital, menggunakan telepon genggam dengan fasilitas super lengkap. Dengan begitu kita dapat mengetahui gaya hidup penduduk dunia dengan cepat. Di era globalisasi, jarak bukan lagi masalah. Apa sebenarnya yang dimaksud globalisasi? Di mana posisi Indonesia dalam proses globalisasi? Apa saja dampak globalisasi terhadap bangsa Indonesia? Cari dan temukan jawabannya pada Bab 3 ini!



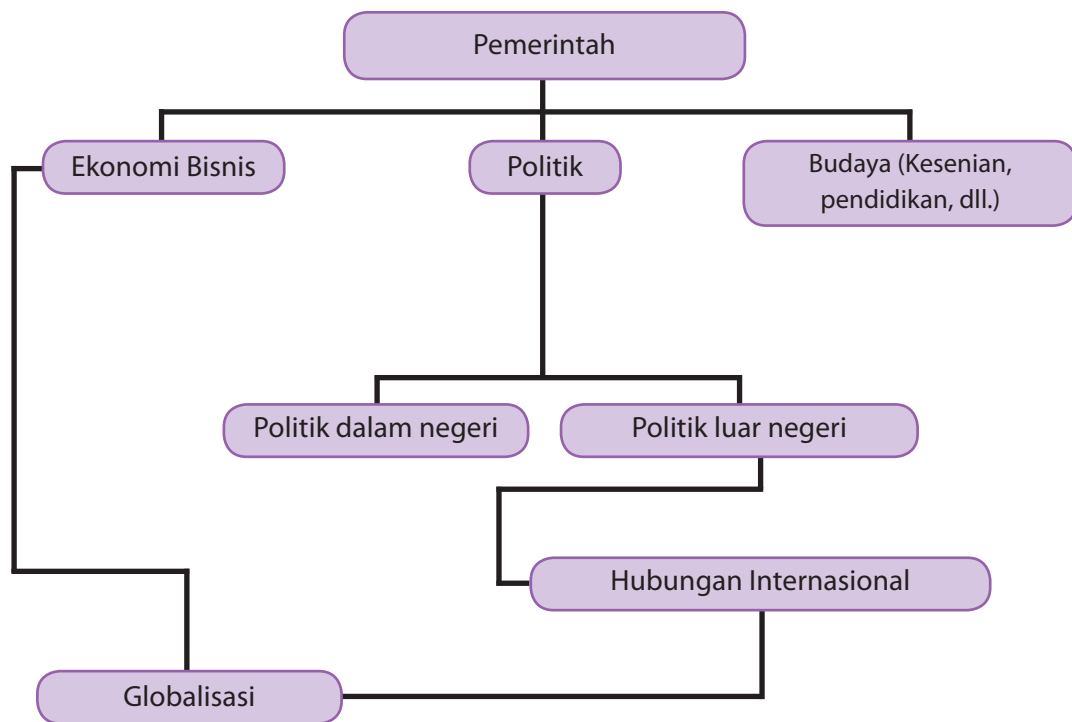
Gambar 3.1 Kemajuna Teknologi Informasi dapat dengan mudah kita peroleh akibat globalisasi.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Kata Penting

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| - Globalisasi | - Globalisasi generasi kedua (G-2) | - Politik luar negeri |
| - Globalisasi generasi ketiga (3-G) | - Hubungan internasional | - Bilateral |
| - Globalisasi ekonomi-bisnis | - Multilateral | - Globalisasi politik |
| - Globalisasi generasi pertama (G-1) | | |

PETA KONSEP





Gambar 3.2 Menonton televisi menyerap informasi dari seluruh dunia.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Globalisasi mungkin kalian tidak tahu persis makna istilah tersebut. Akan tetapi kalian telah merasakan akibatnya. Di era globalisasi seakan dunia tanpa sekat. Misalnya kamu menyaksikan berita tentang bencana tsunami di Aceh beberapa waktu lalu. Pada saat yang bersamaan masyarakat di seluruh dunia juga menyaksikan peristiwa yang menelan korban sekitar 200 ribu jiwa tersebut melalui media informasi via satelit, seperti televisi, internet, atau radio. Itulah salah satu contoh dari terjadinya proses globalisasi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Coba kalian cari contoh globalisasi di bidang lain!

Proses globalisasi tidak hanya terjadi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Akan tetapi juga terjadi pada bidang lain, seperti bidang sains, gaya hidup (life style), seni, olahraga, hobi, serta ideologi.

A. Pengertian dan Pentingnya Globalisasi bagi Indonesia

Globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu bersifat mendunia (global). Globalisasi sebenarnya sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, terutama sejak dua dasawarsa terakhir. Contohnya, ketika di pusat mode dunia di Paris sedang tren pakaian atau fashion model 'you can see', kita pun di Indonesia mengikuti dan memakai trend pakaian serupa. Begitu pula ketika model rambut ala Lady Diana Spencer dari Inggris sedang tren pada era 90-an, kaum wanita di Indonesia pun mengikuti mode rambut serupa. Jadi, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sanggup menahan globalisasi atau tidak terkena arus globalisasi.



Gambar 3.3 Berkesenian salah satu bagian dari globalisasi.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Warga negara di Indonesia merupakan bagian dari warga dunia. Oleh karena itu, kita pun perlu untuk mengetahui seperti apa globalisasi yang terjadi dewasa ini agar kita menghadapi proses globalisasi dengan sebaik-baiknya.

Proses globalisasi perlu kita pahami karena merupakan bagian dari peradaban manusia pada abad ke-21 ini. Kita harus mampu mengambil manfaat globalisasi. Misalnya, mendorong kita meleak teknologi dan sains, senantiasa bersikap terbuka serta membangun dan memupuk semangat kompetisi. Dengan globalisasi kita harus dapat menghargai setiap perbedaan, baik perbedaan bangsa, jenis kelamin, agama, ras, maupun ideologi.

Dalam buku Thomas L. Friedman, *The World is Flat*, disebutkan bahwa globalisasi yang terjadi dewasa ini sudah memasuki globalisasi generasi ketiga. Dia menyebutnya sebagai Globalization 3.0. Globalisasi generasi pertama (G 1.0) disebut sebagai globalisasi antarnegara yang dimulai dari perjalanan Columbus. Globalisasi generasi kedua (G 2.0) adalah globalisasi antarperusahaan yang dimulai sekitar 1800-an, dan globalisasi generasi ketiga (G 3.0) adalah globalisasi antarindividu seperti yang kita alami saat ini. Thomas L. Friedman menelusuri sejarah globalisasi dari mulai runtuhnya Tembok Berlin, revolusi internet, outsourcing, blogging, open source software, Wal-Mart, sampai pada munculnya media-media mobile seperti PDA dan handphone. Cina dan India disebut oleh Friedman sebagai dua negara yang mengalami kemajuan pesat dalam globalisasi.

Dengan melek teknologi dan sains, bangsa Indonesia dapat mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam yang kita miliki. Sumber daya alam yang melimpah tersebut dapat kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Misalnya, untuk kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri serta untuk menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia di bidang teknologi tinggi (high-tech) ialah keberhasilan orang-orang Indonesia menciptakan pesawat terbang yang diproduksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Beberapa negara di dunia telah memesan dan menggunakan pesawat buatan Indonesia ini, seperti Malaysia, Thailand, dan Pakistan. Selain itu, selama lima tahun terakhir putra-putri terbaik Indonesia juga telah mampu bersaing dan menunjukkan kemampuan yang hebat dengan menjadi juara dalam ajang kompetisi Olimpiade Fisika Internasional. Hal itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia.



Gambar 3.4 Aparat TNI sedang bersiap dalam simulasi perang.

Sumber: www.kompascybermedia.com



Gambar 3.5 Siswa Indonesia yang menjuarai Olimpiade Fisika Internasional.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Salah satu unsur terpenting yang dibawa globalisasi adalah keterbukaan. Perlu kamu ketahui bahwa dengan terjadinya globalisasi, suatu negara yang sebelumnya tertutup dan hanya berinteraksi dengan negara-negara tertentu, misalnya negara-negara dalam satu ideologi dapat menjadi terbuka. Misalnya, negara-negara Uni Soviet pada era 80-an dulu dan negara-negara komunis sekutunya di Eropa Timur, akhirnya pecah dan terbagi ke dalam beberapa negara yang merdeka dan berdiri sendiri setelah masuknya paham demokrasi ke kawasan itu. Negara-negara yang kemudian memerdekakan diri dan lepas dari Uni Soviet tersebut, di antaranya Azerbaijan, Georgia, Republik Chechnya, Kroasia, Albania, Serbia, Bosnia, dan lain-lain. Itulah salah satu contoh globalisasi pada bidang politik, ideologi, dan demokrasi.

Globalisasi juga telah membawa angin segar bagi terciptanya semangat kompetisi atau persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan yang semakin ketat. Misalnya, kita sekarang ini dapat memanfaatkan canggihnya teknologi telepon seluler (ponsel/handphone). Saat ini telepon seluler sudah memasuki generasi ketiga (3G), bahkan 3,5G. Berbagai merk ponsel dari berbagai negara di dunia tampak bersaing ketat mengeluarkan produk-produk mutakhir secara periodik. Ponsel dewasa ini tidak hanya digunakan untuk melakukan komunikasi lisan antardua orang. Kini ponsel sudah jauh melampaui dari fungsi awalnya. Dengan ponsel kita dapat menerima dan mengirimkan data, gambar, musik, dan informasi lain via internet dan e-mail yang serba mobile dalam waktu sekejap.

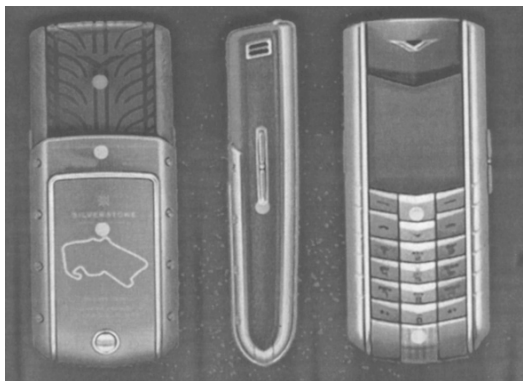


Gambar 3.6 Bubarnya Uni Soviet, tidak memamatkan komunisme.

Sumber: www.wikipedia.com

Globalisasi secara bertahap juga menghilangkan jurang perbedaan, baik perbedaan jenis kelamin, bangsa, dan ras atau warna kulit. Siapapun dan dari manapun dia berasal, dapat menjadi pelaku globalisasi. Globalisasi telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk berkembang maju sesuai kemampuan masing masing. Dengan semakin terbukanya kesempatan tersebut, kalian harus berusaha seoptimal mungkin menimba ilmu pengetahuan dan sains agar tidak ketinggalan. Hal yang lebih penting lagi adalah kalian juga harus mengimbangnya dengan belajar ilmu agama. Dengan bekal ilmu agama tersebut kalian tentu akan mampu menyikapi globalisasi dengan tepat.

Globalisasi masuk dan berkembang di Indonesia paling tidak sudah dirasakan sejak dua dasawarsa yang lalu. Hal itu ditandai dengan semakin derasnya teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media massa, baik cetak dan elektronik (internet, TV, koran, majalah, tabloid, radio, ponsel, dan lain-lain) dan menjadi tren gaya hidup.



Gambar 3.7 Perangkat komunikasi yang semakin canggih, semakin menopang globalisasi di bidang sains.

Sumber: Repro Image Bank

B. Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional pada Era Global

Politik luar negeri secara sederhana artinya adalah hubungan antara pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan negara lain (government to government). Contohnya, Pemerintah Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah India, Amerika Serikat, dan Singapura. Contoh lain, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia menemui PM John Howard atau Presiden SBY berkunjung ke Negara Timor Timur dan bertemu dengan Presiden Xanana Gusmao.



Gambar 3.8 Lumpur Lapindo ditumpahkan di jalanan oleh aktivis Greenpeace, untuk menggugah kesadaran terhadap lingkungan hidup global.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Ciri-ciri utama globalisasi adalah prosesnya serba cepat, dampaknya bersifat massal atau meluas, bersifat mendunia. Pelaku atau penggerak globalisasi pada umumnya memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai medianya.

Hubungan internasional maksudnya hubungan antara organisasi, kelompok, masyarakat suatu negara dengan organisasi, kelompok, masyarakat negara lain. Misalnya, atlet bulu tangkis Indonesia bertanding dalam perebutan Piala Thomas dan Uber di Cina. Peserta pertandingan berasal dari berbagai negara, seperti Malaysia, Swedia, Cina, Korea Selatan, Denmark, Hongkong, dan lain-lain. Contoh lain, organisasi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) internasional, Greenpeace, yang berbasis di Amerika Serikat melakukan demonstrasi bersama dengan LSM Indonesia, yaitu WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Mereka memprotes luapan lumpur panas dari sumur yang dikelola PT Lapindo yang telah menenggelamkan empat desa lebih di Sidoarjo Jawa Timur.

Politik luar negeri ada dua jenis, yaitu yang disebut hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan suatu negara dengan satu negara lain. Contohnya, Indonesia menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, hubungan Indonesia-Malaysia, dan hubungan Indonesia-Singapura. Adapun hubungan multilateral adalah hubungan suatu negara dengan lebih dari satu negara lain. Misalnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, hubungan Indonesia dengan negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam organisasi OPEC, dan lain lain.

Seperti telah kita ketahui bahwa politik luar negeri negara kita adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya negara kita bebas menjalin hubungan dengan negara manapun di seluruh dunia dan tidak memihak salah satu blok negara. Adapun aktif artinya Indonesia selalu siap berperan secara sendirian maupun bersama negara-negara lain dalam menciptakan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan.

Politik luar negeri yang bebas dan aktif telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak era 1970-an. Dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif terutama pada masa Orde Baru sampai sekarang, Indonesia memegang teguh prinsip netralitas dan tidak berpihak pada salah satu blok. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur (komunis) yang dipimpin Uni Soviet.



Gambar 3.9 Apel aparat TNI, merapatkan barisan menyongsong ancaman global terorisme.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Ketika Uni Soviet bubar dan digantikan peranannya oleh Rusia, Indonesia tetap menjalin hubungan dengan negara tersebut. Indonesia juga aktif menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Timur serta dengan negara-negara lainnya di dunia. Indonesia pun sudah sejak lama memberikan sumbangsihnya pada perdamaian dunia. Di bawah naungan bendera PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), Indonesia telah mengirimkan beberapa kali pasukan perdamaian ke Vietnam, Kamboja, Timur Tengah, Bosnia, dan Palestina. Indonesia menjadi penengah dalam konflik Kamboja yang melahirkan Jakarta Messages I dan II.

Pemerintah Indonesia pun berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan organisasi internasional. Indonesia senantiasa menjadi anggota maupun ketua, seperti dalam OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), IMF (International Monetary Fund), WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic Countries), Gerakan Non-Blok (GNB), dan ASEAN. Di bidang olahraga, Indonesia pun turut aktif mengirimkan para atletnya dalam berbagai turnamen Olimpiade, Asian Games, dan Sea Games. Selain itu, Indonesia juga tidak jarang mengirimkan misi-misi kesenian dan kebudayaannya ke berbagai negara.



Gambar 3.10 Sidang para delegasi OPEC, menyamakan persepsi global perminyakan.

Sumber: www.kompascybermedia.com



Gambar 3.11 Perlawanan rakyat Palestina datang karena ada ancaman dan agresi Israel dan sekutunya.

Sumber: www.kompascybermedia.com

agresi militer dan tindakan brutal terhadap warga sipil Palestina. Keadaan seperti itu dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk makin berperan aktif melakukan diplomasi. Negara kita dapat melakukannya secara formal maupun nonformal untuk menghentikan segala bentuk agresi, penjajahan, dan kekerasan sesuai amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama alinea ke-4, yang berbunyi "...segala bentuk penjajahan di atas

dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Perikemanusiaan...."



Gambar 3.12 Sosok masyarakat miskin di pedesaan, inilah dampak buruk globalisasi.

Sumber: Repro Image Bank

Dalam menjalankan politik luar negerinya, pemerintah Indonesia perlu terus menjalin dan mengedepankan hubungan internasional. Hal itu karena hubungan internasional bersifat nonformal, tidak kaku, dan lebih mencerminkan kesetaraan dan prestasi. Adapun politik luar negeri cenderung bersifat formal, kaku, dan terkadang diwarnai unjuk kekuatan dan pengaruh suatu negara terhadap negara lain. Terlebih lagi pada era global seperti sekarang ini, Indonesia perlu meningkatkan peran sertanya dalam berbagai hubungan internasional. Hal tersebut berguna dalam memajukan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat bersama-sama dengan negara-negara yang sederajat. Bersama dengan itu, Indonesia terus aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia dan tatanan dunia yang lebih adil.

Runtuh dan bubarnya Uni Soviet telah menjadikan Amerika Serikat dewasa ini sebagai 'polisi dunia' (Globo Cop). Tak jarang Amerika Serikat bertindak seenaknya, menekan, mengadu domba, serta menghancurkan suatu negara. Contohnya, intervensi dan agresi Amerika Serikat terhadap Irak dan Afghanistan. Amerika Serikat juga mendukung terhadap Israel yang melakukan

Persoalan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kerusakan lingkungan hidup, dan eksploitasi sumber daya alam perlu perlu mendapat perhatian serius. Masalah tersebut menjadi prioritas perhatian dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional. Banyak negara lain yang peduli terhadap nasib negara-negara berkembang seperti Indonesia.

C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Bagi Indonesia, masuknya arus globalisasi tidak perlu ditakuti secara berlebihan karena globalisasi sudah merupakan keniscayaan bagi suatu negara. Mengapa dikatakan demikian? Dengan adanya globalisasi, Indonesia perlu bekerja keras membenahi berbagai persoalan yang selama ini tidak seiring dan sejalan dengan semangat globalisasi. Misalnya, persoalan hak asasi manusia (HAM), korupsi, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah yang disebabkan rendahnya mutu pendidikan. Selain itu persoalan birokrasi yang bagi sebagian besar negara-negara lain yang berurusan dengan pemerintah Indonesia masih dianggap berbelit-belit, tidak transparan, dan sarat dengan korupsi.

Globalisasi membawa semangat perubahan yang terus-menerus, kreatif, inovatif dalam berkarya dan bekerja, serta selalu membutuhkan semangat kompetitif, terbuka, dan demokratis. Apabila negara kita tidak siap dengan semangat globalisasi, sudah pasti Indonesia akan tergilas dan tertinggal oleh kemajuan negara-negara lain. Contohnya, Vietnam dan Cina. Kedua negara ini secara spektakuler telah meninggalkan Indonesia dalam bidang perdagangan, teknologi, dan industri.

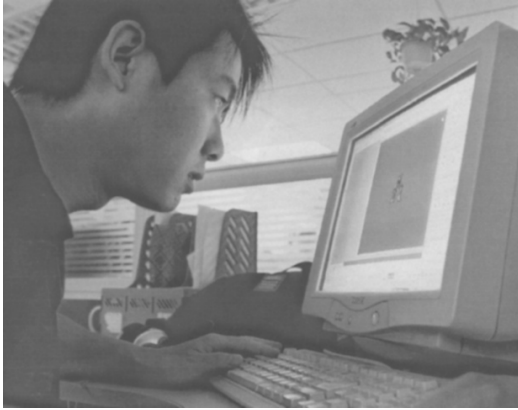
Sumber daya manusia (SDM) Indonesia mutlak harus ditingkatkan kualitasnya dengan cara mendorong kualitas pendidikan nasional. Pendidikan harus menjadi prioritas peningkatan SDM karena SDM yang dibutuhkan dalam era globalisasi ialah SDM yang memiliki keterampilan (skill) yang tinggi. Era globalisasi membutuhkan manusia handal dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai basis utama dalam globalisasi.

Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk meningkatkan kualitas SDM ini. Misalnya, masalah gedung sekolah yang tidak layak untuk belajar, kualitas tenaga pengajar yang rendah, kesejahteraan tenaga pendidikan yang masih jauh dari layak. Keadaan diperparah lagi dengan adanya kurikulum yang terus-menerus berubah dan fasilitas pendidikan yang minim.

Depdiknas mau tidak mau harus melakukan langkah dan kebijakan radikal untuk meningkatkan kualitas SDM. Depdiknas harus menerapkan sistem pendidikan yang berorientasi pada hasil, menyediakan tenaga pendidik yang profesional. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan menerapkan manajemen berbasis siswa yang profesional, merehabilitasi sarana pendidikan yang layak, menyediakan fasilitas (gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah) yang dilengkapi teknologi mutakhir. Depdiknas juga harus memerhatikan kesejahteraan tenaga pen-

didik agar dapat hidup layak serta mengirimkan tenaga-tenaga pendidik secara berkesinambungan untuk bersekolah di luar negeri.

Kalian telah mengetahui beberapa dampak positif globalisasi. Se-



Gambar 3.13 Praktik komputer, mematangkan diri menghadapi globalisasi.

Sumber: Repro Image Bank

lain dampak positif tersebut, globalisasi juga membawa dampak negatif yang luar biasa jika kita tidak hati-hati. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang memadai agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kita sekarang dapat dengan mudah menyaksikan sendiri bagaimana di hampir semua sudut jalan terpampang media cetak yang berbau pornografi. Barang-barang tersebut dijual bebas untuk siapapun, termasuk anak-anak, tanpa ada undang-undang yang melarangnya. Belum lagi bentuk-bentuk pornografi dalam bentuk CD, VCD, DVD yang dapat diakses di dalam kamar-kamar pribadi. Kini juga merebak pornoaksi (kegiatan pelacuran) di setiap sudut

kota, merajalelanya penggunaan obat-obat terlarang (narkotika, kokain, ekstasi, dan lain-lain), serta gaya hidup konsumtif yang kurang mendidik dan cenderung hanya pamer kekayaan.



Gambar 3.14 Perang terbuka, episode kemanusiaan yang menyedihkan yang dapat mengancam globalisasi.

Sumber: Repro Image Bank

Untuk menghindari dampak negatif globalisasi tersebut, semua sangat bergantung pada keputusan kalian sendiri, bukan pada orang tua atau pada orang lain. Kalian harus pandai membawa diri dalam pergaulan sehari-hari. Kalian harus bisa memilih teman yang berakhlak baik serta tekun belajar dan beribadah. Kalian harus bekerja keras dalam menggapai cita-cita serta menuntut ilmu tiada henti baik di bangku sekolah maupun di lingkungan luar sekolah dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. Dengan begitu kalian akan mampu menggali, mengasah, dan mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin.

D.

Menentukan Sikap terhadap Dampak Globalisasi

Nah, sekarang bagaimana bangsa kita harus bersikap dalam menghadapi arus globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, demokrasi, HAM, dan gaya hidup? Ada satu ungkapan mengenai sikap kita dalam menghadapi globalisasi tersebut, yaitu “think globally and

act locally.” Artinya, bangsa Indonesia mutlak berpikir global, tetapi tetap harus bertindak lokal. Dengan demikian, potensi-potensi lokal yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti kesenian, sumber daya alam, dan lain-lain harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri untuk kemudian pada akhirnya dapat ‘dijual’ sampai mendunia.



Gambar 3.15 Atraksi kesenian tradisional Indonesia di mancanegara, menembus kebudayaan global.

Sumber: Repro Image Bank

Kita semua mau tidak mau harus siap menghadapi arus globalisasi yang masuk ke wilayah manapun di dunia termasuk ke Indonesia dengan deras. Globalisasi menuntut semua orang di manapun di dunia selalu bersikap arif dan bijaksana. Mengapa demikian? Karena proses globalisasi sangat bergantung pada diri kita sendiri yang memanfaatkan berbagai perangkatnya. Misalnya, hendak mengakses informasi di internet. Internet menyediakan jutaan situs informasi yang positif maupun negatif dan sudah tersedia lengkap. Tangan kalian tinggal mengklik situs-situsnya maka dalam

hitungan detik semua informasi dan pengetahuan yang kalian inginkan akan secara lengkap. Keputusannya ada di tangan kalian, apakah kalian mau mengakses informasi dan pengetahuan yang baik atau sebaliknya, jika kalian memilih informasi yang berbau kekerasan, pornografi, dan informasi negatif lainnya, maka saat itu sebenarnya kalian telah mulai menghancurkan diri kalian. Mengapa demikian? Karena tindakan kalian itu pasti akan kalian ikuti dengan tindakan serupa pada lain waktu. Kalian akan terbawa arus pada kehidupan kotor yang akan menjerumuskan. Selanjutnya, kalian akan terpuruk dan hanya mampu menyesali diri. Nah, akankah kalian bernasib seperti itu? Jangan! Negeri ini sangat membutuhkan kalian untuk menjadikan Indonesia yang maju, adil, dan beradab.

Apabila kita tidak arif dan selektif dalam mempergunakan teknologi internet, jelas kita perlu berpikir ulang. Hal itu karena tidak ada pihak yang mampu melakukan pelarangan dan hukuman bagi para pengguna internet yang mengakses berbagai informasi negatif itu. Teknologi semacam ini bersifat sangat bebas dan terbuka, serta sangat sulit dikontrol penggunaannya. Tidak ada batasan usia bagi para pengguna internet. Anak-anak maupun remaja dapat secara bebas menggunakan media ini. Selain itu, berbagai informasi lewat internet dapat diakses dari manapun termasuk di dalamnya dari rumah dan kamar-kamar pribadi masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun tumbuh dengan cepat. Inilah bagian yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat adanya globalisasi.

RANGKUMAN

1. Globalisasi merupakan proses kemajuan kebudayaan dan peradaban manusia yang memiliki cakupan penyebaran yang berskala dunia.
2. Globalisasi dapat mendorong negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk melakukan berbagai langkah strategis bagi kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti bidang teknologi tinggi, kesenian, industrialisasi, dan olahraga.
3. Globalisasi dewasa ini telah memasuki generasi ketiga yang disebut globalisasi antarindividu.
4. Hubungan dan politik luar negeri dapat dilakukan dengan cara bilateral maupun multilateral.
5. Di tangan masyarakat yang bersikap dan berperilaku buruk, globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti maraknya kekerasan, gaya hidup yang cenderung materialistis dan individualis, pornografi, dan pornoaksi.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu!

- A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!
1. "Think globally, act locally" artinya
 - a. Berpikir lokal, bertindak global
 - b. Berpikir global, bertindak global
 - c. Berpikir lokal, bertindak lokal
 - d. Berpikir global, bertindak lokal
 2. Hubungan luar negeri antara pemerintah suatu negara dengan organisasi non-pemerintah negara lain termasuk dalam
 - a. hubungan luar negeri
 - b. hubungan bilateral
 - c. politik luar negeri
 - d. hubungan multilateral

3. Globalisasi generasi kedua (G2.0) adalah globalisasi antarperusahaan yang dimulai sekitar tahun
 - a. 1600-an
 - b. 1700-an
 - c. 1800-an
 - d. 1900-an
4. Globalisasi antarindividu termasuk globalisasi generasi
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
5. Dua negara di Asia yang mengalami kemajuan pesat dalam globalisasi adalah
 - a. Indonesia–Vietnam
 - b. India–Cina
 - c. Indonesia–India
 - d. Cina–Vietnam
6. Hubungan suatu negara dengan lebih dari satu negara lain disebut
 - a. hubungan luar negeri
 - b. hubungan bilateral
 - c. politik luar negeri
 - d. hubungan multilateral
7. Greenpeace adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dunia dalam bidang
 - a. hukum
 - b. lingkungan hidup
 - c. pendidikan
 - d. ekonomi
8. VCD dan DVD termasuk kategori media massa
 - a. elektronik
 - b. khusus
 - c. cetak
 - d. cangguh
9. Jika kamu hendak mengambil data dari internet harus dilakukan dengan cara....
 - a. e-mail
 - b. recording
 - c. chatting
 - d. download
10. Jika kamu saling berbalas cerita atau bertanya jawab dengan temanmu dalam waktu singkat di internet disebut
 - a. e-mail
 - b. recording
 - c. chatting
 - d. download

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa globalisasi dianggap penting bagi bangsa Indonesia?
2. Apa saja ciri-ciri umum dari globalisasi?
3. Apa dampak positif dan negatif globalisasi? Jelaskan!
4. Apakah menurut pendapatmu bangsa Indonesia sudah siap menerima globalisasi? Apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi globalisasi? Jelaskan!
5. Apa yang dapat kamu lakukan dalam menghadapi globalisasi yang masuk ke Indonesia? Apa kontribusi atau sumbangsih kamu bagi globalisasi?

6. Apa perbedaan antara politik luar negeri dan hubungan luar negeri?
7. Tunjukkan langkah-langkah untuk mengakses internet dan bukalah website: [www/google.com](http://www.google.com). untuk mencari website pendidikan!



TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Teknologi! Salinlah di buku tugas kalian!

Globalisasi	:
Teknologi	:
Internet	:
E-mail	:
Fashion	:
Satelit	:
Telekomunikasi	:
Chatting	:
Download	:



KEGIATAN

Kunjungilah warung internet (Warnet) terdekat dari tempat tinggal kalian. Carilah situs-situs yang dapat menambah ilmu pengetahuan yang diajarkan sekolahmu terutama bidang yang sangat kamu minati atau yang menjadi hobi kalian sebanyak mungkin. Buka dan pahami isi situs-situs pendidikan dan pengetahuan tersebut, serta download data tersebut ke disket. Setelah dipahami isi situs tersebut, berikan komentar atau opini kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari situs tersebut. Buat dalam bentuk laporan singkat. Setelah selesai, serahkan kepada guru kalian untuk dinilai!

Berprestasi Demi Keunggulan Bangsa

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa.
2. Siswa mampu mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan.
3. Siswa mampu menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.

Siapa pun pasti berkeinginan untuk meraih prestasi tinggi dalam kehidupannya. Berprestasi dapat diraih dalam bidang apapun sesuai bidang yang digeluti. Bangsa Indonesia dewasa ini sangat membutuhkan orang maupun lembaga yang berprestasi bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga pada tingkat internasional. Prestasi ini akan menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia pun mampu bersaing dalam segala bidang dengan negara-negara lain di dunia. Untuk mencapai prestasi tersebut dibutuhkan manusia-manusia Indonesia yang mau bekerja keras dan cerdas dalam menuntut ilmu. Dia senantiasa melakukan inovasi-inovasi, mengasah kemampuan menuju profesionalitas, dan sebagainya. Apakah yang dimaksud prestasi? Bagaimana caranya untuk meraih prestasi? Apa saja prestasi yang dapat dipersembahkan untuk bangsa dan negara? Simak baik-baik uraian Bab 4 ini.



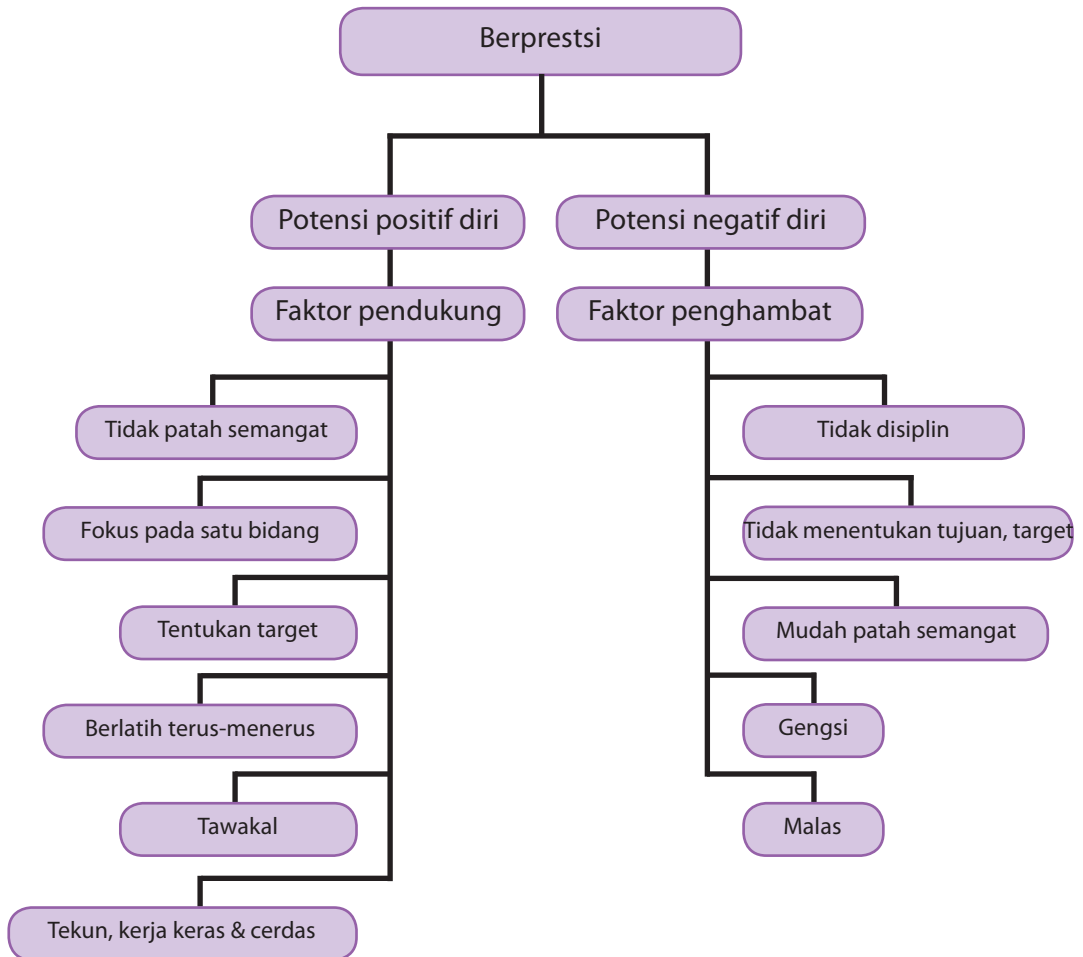
Gambar 4.1 Sumber daya manusia yang unggul diperlukan untuk menunjang pembangunan bangsa.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Kata Penting

- | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------------|
| - Prestasi diri | - Kognitif (IQ) | - Potensi diri |
| - Afektif (EQ) | - Keunggulan bangsa | - Kecerdasan beragama (SQ) |
| - Kecerdasan majemuk | - Otoritatif | |

PETA KONSEP



Perlu diketahui bahwa bangsa Jepang sampai abad ke-18, bukanlah apa-apa. Saat itu bangsa Jepang tidak memiliki prestasi apapun yang bisa dibanggakan. Akan tetapi, setelah dicanangkannya Restorasi Meiji pada abad ke-19, Jepang mulai menunjukkan prestasinya sebagai bangsa yang gigih dan tidak mudah menyerah. Bangsa Jepang banyak belajar dari prestasi bangsa lain, taat pada adat-istiadat tradisional, dan melakukan inovasi-inovasi. Bangsa Jepang yang miskin sumber daya alam serta hancur dan porak-poranda akibat perang melawan pasukan Sekutu, dalam kurun waktu tiga abad bisa bangkit dan maju di segala kehidupan. Mampukah bangsa Indonesia menyamai prestasi bangsa Jepang tersebut?

A. Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa

Sebenarnya apa itu prestasi? Menurut Elly Risman, psikolog dari Club Buah Hati, prestasi adalah perwujudan dari bakat dan kemampuan. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang berupa potensi. Namun, walau potensi ini sudah ada di dalam diri, tetap butuh latihan dan pengembangan terus-menerus. Jika bakat tidak dilatih dan dikembangkan, maka tidak mendatangkan manfaat apa pun pada orang yang memilikinya.

Kemampuan merupakan daya atau kesanggupan melakukan suatu tindakan. Kemampuan ini didapat dari hasil pembawaan dan latihan. Kenyataannya, walau seorang anak memiliki bakat dan kemampuan, tidak mudah membuat seorang anak berprestasi.



Gambar 4.2 Pembalap muda Daniel Pedrosa juara seri Moto GP.

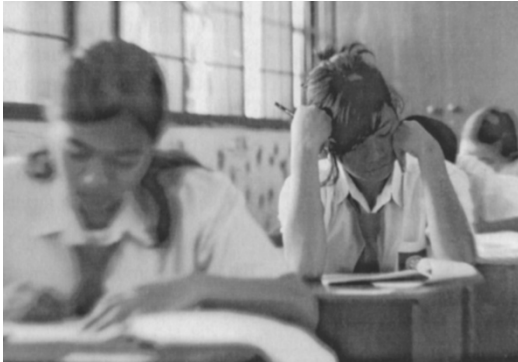
Sumber: www.kompascybermedia.com

“Banyak kenyataan di luar diri anak yang membuat kedua hal itu tidak muncul. Kenyataan paling jelas adalah kenyataan di keluarga, kenyataan di media, dan kenyataan di sekolah,” kata Elly di tengah seminar Club Buah Hati bertajuk “Mengantar Anak Berprestasi dengan Cara Menyenangkan”, di Multi Function Room Graha Niaga.

Kenyataan-kenyataan itu harus dilihat secara keseluruhan. Misalnya di rumah, bila setiap hari sang anak mendapatkan gizi yang baik dan rangsangan yang tinggi dari keluarganya, anak

bisa berkembang dengan cepat dan cerdas. Namun, di sisi lain ada orang tua yang menuntut segala sesuatu dengan standar tinggi yang begitu tingginya sampai tidak satu pun anak bisa menjangkaunya. Anak tidak diberi kesempatan untuk sekali-kali merasakan hal-hal di bawah standar yang ditetapkan. Jika prestasi anak di bawah standar, mereka selalu hanya dimarahi saja bukan dibesarkan hatinya untuk semakin lebih baik.

Hal lain yang membuat anak tidak berprestasi, yaitu sikap orang tua yang membiarkan anak mengonsumsi seluruh sajian yang ditayangkan di media. Sajian seperti di televisi atau komik memang sangat menarik bagi anak, namun tidak semua informasi itu sehat dan dibutuhkan anak. Akibatnya, anak mengetahui banyak hal yang belum pantas. Orang tua lupa dia tidak punya kemampuan mengontrol seluruh materi yang ditampilkan di media.



Gambar 4.3 Belajar meraih cita-cita.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Disekolah, anak juga mendapatkan kenyataan yang membuatnya sulit berprestasi. Misalnya, materi pembelajaran dan cara penyampaian tidak menarik. Hal ini terjadi karena guru tidak paham tentang perkembangan anak. Gaya komunikasi guru tidak sesuai dengan anak-anak. Selain itu, buku dan alat peraga yang digunakan tidak bisa memenuhi rasa ingin tahu dan kemampuan anak.

Lalu, bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak sehingga anak bisa berprestasi? “Ada tiga C yang harus diperhatikan, yakni children (anak), content (materi), dan context (situasi),” kata Elly.

Menurut Elly, orang tua dan guru harus menyadari setiap anak merupakan pribadi yang unik dan berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan ini terjadi karena setiap anak mempunyai bakat, kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Setiap anak pastilah mempunyai salah satu dari sembilan kecerdasan yang diberikan Tuhan. Bahkan, ada juga anak yang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kecerdasan linguistik, matematika-logika, ruang-visual, musik, naturalis, interpersonal, intrapersonal, kemampuan olah tubuh, dan spiritual.

“Selain itu, ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan anak, seperti fisik, iman, akhlak, ibadah, emosi, sosial, mental, dan keterampilan. Biarkan anak mengembangkannya seperti keinginannya, jangan kembangkan seperti keinginan orang tua. Orang tua hanya mengarahkan saja,” kata Elly.

Begitu juga dengan materi yang akan disampaikan pada anak. Materi harus yang dibutuhkan anak, bukan yang diinginkan orang tua. Namun demikian, materi itu juga harus disesuaikan dengan perkembangan anak, kemampuan, dan bakat anak.

Perlakuan yang tepat dan materi yang sesuai tidak akan mempunyai efek yang positif jika tidak disampaikan pada situasi yang tepat. “Ada tiga cara penyampaian yang efektif, yakni dengan bermain, bernyanyi, dan bercerita. Tidak ada salahnya sesekali kita meninggalkan status kita



Gambar 4.4 Ribuan calon mahasiswa sedang mengikuti tes SPMB.

Sumber: www.kompascybermedia.com

sebagai orang tua. Kita bisa juga sekali-sekali berubah menjadi badut, tukang sulap, ilmuwan, atau sahabat bagi anak kita,” ujar Elly.

Satu yang harus dipahami orang tua, prestasi anak bukanlah prestasi untuk orang tuanya. Prestasi itu untuk diri anak itu sendiri. Orang tua cukup mengarahkan dengan benar dan membantu anak dengan cara-cara yang disukai anak. Bukan dengan hukuman atau omelan yang bisa merusak hubungan harmonis anak dengan orang tua. Keberhasilan anak tidak saja dari usaha yang dilakukan anak, tetapi juga tergantung pada orang tua dan lingkungan di sekitarnya. (ARN-[www/kompas.com](http://www.kompas.com))

B. Mengenal Potensi Diri untuk Berprestasi Sesuai Kemampuan

Kamu akan bangga jika di sekitarmu terdapat orang-orang yang berprestasi dalam suatu bidang tertentu. Kamu pun barangkali berkeinginan meraih prestasi seperti mereka. Perasaan seperti itu sangatlah wajar dan memang harus menjadi cita-citamu dari mulai sekarang. Prestasi dapat diraih oleh siapapun dan dalam bidang apapun. Banyak contoh atau kisah orang-orang berprestasi dan sukses dalam olahraga, sains, bisnis, profesi, dan lain-lain.



Gambar 4.5 Republik BBM, sindiran terhadap pemerintah.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Sebenarnya pada era modern seperti sekarang ini, sangat mudah bagi seseorang mendapatkan informasi tentang orang-orang terkenal dan masih berusia muda. Mereka sukses dalam karir, bisnis, profesi, dan bidang-bidang lainnya. Kesuksesan mereka memang ditunjang oleh pendidikan yang relatif semakin bagus, kemampuan diri yang terus berkembang, serta tentu saja peluang yang semakin terbuka di berbagai bidang, terutama pada bidang teknologi informasi dan komunikasi (IT-information technology).

Dari semua kisah orang-orang sukses tersebut mereka meraihnya dengan penuh kerja keras, jatuh-bangun, hidup perih dan prihatin. Mereka tidak jarang dihadapkan pada banyak kendala sejak awal yang mengakibatkan ambuknya

mental, hilangnya kepercayaan diri, dan hancurnya bisnis. Sukses yang mereka raih telah ditebus dengan berbagai pengorbanan. Tidak ada orang yang sukses dalam hidup karena hidup santai, selalu berpikir negatif, dan tidak disiplin.

Peran orang tua sangatlah besar dalam mendidik anak-anaknya. Dengan pola asuh yang tepat mereka diharapkan dapat berprestasi tinggi. Pola asuh yang tepat, menurut DR. M. Enoch Markum, Dosen Psikologi UI, yang dikutip dari Majalah Intisari The Online, adalah dengan pola otoritatif, bukan pola otoriter maupun pola serba boleh (permisif).

Mengutip pendapat D. Baumrind, dengan pola asuh otoritatif orang tua akan menerapkan kendali yang tinggi pada anak. Ia pun menuntut prestasi tinggi, tapi dibarengi sikap demokratis dan kasih sayang yang tinggi pula. Pola asuh model ini kuat dalam kontrol dan pengawasan, tetapi tetap memberi tempat bagi pendapat anak. Pola asuh inilah yang menurut DR. Enoch sebagai pendukung seorang anak berprestasi tinggi. Berbeda dengan pola asuh otoriter yang mana orang tua sangat menanamkan disiplin dan menuntut prestasi tinggi pada anaknya. Hanya sayang orang tua tidak memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pendapat, sekaligus menomorduakan kebutuhan anak.

Kebalikan dari pola asuh otoriter adalah permisif. Dalam golongan ini orang tua bersikap demokratis dan penuh kasih sayang. Namun, di sisi lain kendali orang tua dan tuntutan berprestasi terhadap anak itu rendah. Anak dibiarkan berbuat sesukanya tanpa beban kewajiban atau target apa pun.



Gambar 4.6 Seseorang yang sedang menulis merangkai harapan.

Sumber: Repro Image Bank

Mendidik anak di zaman serba kompleks nilai seperti sekarang memang sangat dilematis. Ditangani dengan tangan besi, bisa bisa ngambek. Kalau serba boleh, anak jadi manja dan semau gue. Lewat disertasinya, Dr. M. Enoch Markum membuktikan, pola asuh otoritatif sangat efektif untuk menunjang anak berprestasi tinggi. Apa kelebihan pola asuh ini?

Dalam satu kasus dikisahkan, sejak menikah, Anna (bukan nama sebenarnya) punya obsesi mempunyai anak yang cerdas. Maka, ketika hamil, ia sangat memanjakan janin dalam

kandungannya. Setiap hari ia mengonsumsi makanan bergizi, bervariasi, dan seimbang, plus melahap berbagai makanan tambahan.

Sementara itu, Ibu Siska merasa cemas, anak perempuannya yang duduk di kelas I SD sering kedodoran dan selalu mendapat angka merah untuk setiap mata pelajaran ilmu pasti yang banyak dihantui murid itu.

Maka ia pun mendatangkan guru di rumah untuk memberikan pelajaran tambahan demi mendongkrak nilai-nilai ilmu pasti anaknya yang hampir selalu jelek.

Kedua ibu itu hanya sedikit contoh dari hampir setiap orang tua yang memiliki keinginan dan harapan yang besar agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak cerdas dan berprestasi tinggi di sekolah. Dalam contoh, ibu yang satu melakukan pendekatan dengan menekankan asupan gizi yang baik sejak dini. Adapun ibu yang lain dengan menambah porsi belajar melalui pemberian pelajaran tambahan. Namun, hal yang juga patut dicatat, prestasi di sekolah, juga yang lebih penting nantinya prestasi dalam karir ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, sangat tergantung pada bagaimana orang tua menerapkan pola asuh yang tepat buat anak-anaknya.

Untuk sampai pada kesimpulan akhir pola asuh mana yang paling efektif, Enoch yang mantan ketua Jurusan Psikologi Sosial Fakultas Psikologi UI, 1984 – 1986, itu mengumpulkan subjek penelitian dan membaginya ke dalam dua kategori. Kelompok pertama adalah mahasiswa berprestasi tinggi. Golongan ini adalah mahasiswa yang dinyatakan sebagai juara I dan atau juara II dalam pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional tahun 1996 dan 1997. Ia paling tidak duduk di semester VI dengan minimal indeks prestasi kumulatif 2,75. Kelompok kedua adalah mahasiswa berprestasi rendah. Di dalam kategori ini adalah mahasiswa yang tercatat tidak mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat perguruan tinggi, karena indeks prestasi kumulatif mereka pada semester VI kurang atau sama dengan 2,00.

Dari hasil penelitian tersebut Enoch akhirnya menyimpulkan, pola asuh otoritatif akan mendorong pembentukan sifat kerja keras, disiplin, komitmen, prestatif, mandiri, dan realistis pada individu. Sementara sifat yang paling besar kontribusinya bagi tinggi-rendahnya prestasi adalah sifat disiplin.

Ruang tawar-menawar

Lalu, bagaimana menerapkan pola asuh yang prospektif itu? Menurut mantan Direktur Kemahasiswaan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini, pola asuh otoritatif bisa dilakukan sejak dini. Misalnya saja dengan memberi target belajar, taruhlah dua atau tiga jam setiap hari. Kalau ini sudah disepakati antara orang tua dan anak, maka penerapannya terserah pada anak, mau dihabiskan dua jam sekaligus atau dibagi dua menjadi sejam sejam. Atau barangkali anak mau menonton dulu acara TV kesukaannya. Bisa juga anak ingin pergi berenang sore hari dan baru mengerjakan PR malam harinya. “Dalam hal ini orang tua pun bisa memenuhi keinginannya asalkan janji anak untuk belajar dan mengerjakan PR tetap dilakukan,” katanya.



Gambar 4.7 Menuai prestasi harus diperjuangkan.

Sumber: Repro Image Bank

Dalam ilustrasi itu tampak bahwa pola otoritatif memberi ruang tawar-menawar antara orang tua dan anak. Orang tua bersedia mendengarkan keinginan anak, sementara anak tetap diberi suatu target yaitu belajar. Pada praktiknya, pola asuh ini juga memberikan “pendidikan” pada orang tua, misalnya mereka yang mendidik secara otoriter. Soalnya, ia harus belajar mengendalikan diri untuk tidak memaksakan kehendak dan siap bertukar pikiran dengan anak. Begitu pun orang tua yang selama ini permisif. Ia harus berani memberi batasan dan target yang realistis.

Hanya perlu diingat, penerapan berbagai aturan itu tidak bisa disamaratakan. Aturan keluarga yang satu tidak bisa diterapkan begitu saja pada keluarga lain. Karena itu segala aturan yang akan diberlakukan sebaiknya dibicarakan dan disepakati lebih dulu antara orang tua dan anak. Kepekaan orang tua terhadap kebutuhan dan perasaan anak menjadi salah satu unsur sentral dalam pola asuh otoritatif. “Jangan sampai terjadi semua orang ada di rumah, tetapi tak ada komunikasi dan sibuk dengan dunianya sendiri. Ayah baca koran, ibu sibuk di dapur, sementara anak diam menonton televisi” tandas Enoch. Karena itu, menurut dia, kegiatan bersama menjadi teramat penting. Misalnya, makan malam bersama atau nonton TV bareng. Di situlah orang tua bisa menyerap keinginan si anak.

Untuk melatih kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, Enoch menyarankan para orang tua mengikuti pelatihan kepekaan (*sensitiveness training*) seperti yang kini tengah digalakkan di New York. Di banyak kota besar di Amerika orang merasa hanya berupa “nomor”, tanpa sentuhan kemanusiaan yang memadai.

Dalam kacamata Enoch, untuk bisa menerapkan pola asuh ini idealnya orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Pasalnya, pola asuh model ini membutuhkan penalaran tertentu. Tidak bisa asal larang. Orang tua harus bisa menjelaskan mengapa ia melarang sesuatu atau memberi target tertentu secara rasional. Ini untuk menghindarkan debat kusir atau anggapan anak bahwa orang tuanya cerewet lantaran asal larang. Enoch pun menepis anggapan bahwa anak belum bisa menerima penjelasan yang masuk akal. “Justru itu persepsi orang tua yang salah lantaran selalu menganggap anak masih kecil sehingga tidak perlu diajak berembung soal apa pun,” katanya.

Keberhasilan pola asuh otoritatif harus pula ditunjang oleh peranan para guru di sekolah. Idealnya, pola asuh di rumah dan pembinaan para guru di sekolah tidak jauh berbeda. Sebab, sekolah merupakan

lingkungan kedua setelah rumah, yang dapat membentuk sifat seseorang. Enoch memberi contoh, Dr. H. Arief Rachman, M.Pd., kepala sekolah SMA IKIP Jakarta (Lab School), sekaligus dosen luar biasa di Fakultas Psikologi UI, ia anggap sebagai guru “ideal”. “Beliau tahu persis siapa muridnya,” katanya. Menurut Enoch, Arief Rachman tahu jika si A, misalnya, suka dijemput ibunya sepulang sekolah. Ketika dilihatnya si A belum pulang, ia akan bertanya, “Belum dijemput ibu, ya?” Atau si B yang pernah mengeluh kesulitan dalam matematika. Saat bertemu, ia akan bertanya, “Bagaimana dengan masalah matematikanya?”

Ibu Pegang peranan



Gambar 4.8 Menanamkan prestasi.

Sumber: Repro Image Bank

Agaknya, bila pola asuh otoritatif ini dilakukan, peranan ibu sangatlah besar dalam menanamkan kebiasaan yang baik. “Bukannya ayah tidak berperanan tetapi peran ibu lebih nyata,” jelas bapak tiga putri yang semuanya sarjana sastra itu. Coba perhatikan saja betapa ibu lebih peduli dengan tetek-bengek sehari-hari. Mulai dari soal gosok gigi, ganti baju, menaruh sepatu di rak, kemudian makan sepulang sekolah. Jadi, ibulah yang lebih banyak peranannya dalam menanamkan segala tindakan yang nyata sehari-hari, termasuk juga cuci tangan sebelum makan, cuci kaki sebelum tidur, dan kebiasaan lain. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti gosok gigi, cuci tangan sebelum makan, cuci kaki sebelum tidur terus-menerus ditanamkan lama-kelamaan akan terbentuk sifat bersih. Sifat ini akan melekat, bahkan bisa menjadi aktif

dalam bentuk mengoreksi atau paling tidak mempertanyakan mengapa orang lain tidak melakukan hal seperti dia dalam soal kebersihan. Melalui penanaman kebiasaan ini pun kedisiplinan bisa ditanamkan karena kedisiplinan juga merupakan produk kebiasaan. Misalnya, kebiasaan menyeberang jalan pada tempatnya, tepat waktu dalam berjanji, atau antri ketika membeli karcis di loket. Berhubung pembentukan sifat itu merupakan proses yang memerlukan waktu, maka kebiasaan-kebiasaan baik itu idealnya mulai ditanamkan sejak dini.

Dengan bertambahnya umur dan penalaran, anak akan makin menyadari, misalnya manfaat gosok gigi pada waktunya, mencuci kaki sebelum tidur, mencuci tangan sebelum makan. Bagaimana besarnya peranan ibu, penyandang Satya Lencana Penegak ‘66 itu mengambil contoh kesuksesan negara Jepang. Menurut dia, sukses Negeri Sakura itu adalah sukses anak-anak di bawah didikan ibu Jepang yang amat peduli pada pendidikan anak. Kaum ibu di Jepang bukan hanya sibuk di dapur, tetapi mereka juga aktif terlibat dalam proses pendidikan anak-anaknya.

Demikian besar pelibatan diri ibu di Jepang sampai-sampai mereka rela tidak menonton TV. Tetapi justru ikut bersekolah pada “sekolah untuk ibu”, membantu pekerjaan rumah anaknya, dan bila diperlukan mencari pekerjaan paruh waktu untuk membiayai les tambahan anaknya. Ibu yang seperti ini di sana dijuluki sebagai kayoiku mama, ibu pendidik. Ibu yang bekerja atau berkarir, menurut Enoch, pun tidak ada masalah. “Yang penting harus ada komunikasi. Ibu bisa saja mengecek kebutuhan anak lewat telepon. Bukankah sekarang eranya komunikasi canggih, ada handphone?” jelas pria kelahiran Cirebon tahun 1942 ini.

Enoch Markum mengakui beratnya tantangan yang harus dihadapi para orang tua di zaman sekarang, lebih-lebih di kota-kota besar. Karena itu tak ada salahnya bila orang tua juga ikut “belajar” dan mengembangkan diri secara informal dengan bertukar pikiran dan pengalaman antarsesama orang tua, atau secara formal mengikuti Parent Effectiveness Training. Berikut merupakan Tabel Pola Asuh Orang Tua Menurut D. Baumrind.

Tabel Pola Asuh Orang Tua menurut D. Baumrind

Perilaku Pola asuh	Kendali orang tua		Sikap Demokratis		Tuntutan berprestasi		Kasih sayang	
	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
Otoriter	V			V	V			V
Otoritatif	V		V		V		V	
Permisif		V	V			V	V	

Pola asuh otoritatif yang dikemukakan DR. Enoch Markum tentu bukan hanya dalam kerangka bagaimana anak dapat berprestasi optimal secara akademik saja. Akan tetapi, juga dalam sikap, keterampilan, dan beribadah kepada Tuhan untuk menjalankan kewajiban beragama. Prestasi yang bersifat menyeluruh (holistik) inilah oleh Dr. Andyda Meliala disebut kecerdasan majemuk, diyakini akan membawa seseorang berprestasi secara lengkap dan utuh. Lebih jauh, Dr. Andyda Meliala menguraikan tentang kecerdasan majemuk yang dimaksud.

Sebagai orang tua masa kini, kita seringkali menekankan agar anak berprestasi secara akademik di sekolah. Kita ingin mereka menjadi juara dengan harapan ketika dewasa mereka bisa memasuki perguruan tinggi yang bergengsi. Kita sebagai masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa sukses di sekolah adalah kunci untuk kesuksesan hidup di masa depan.

Pada kenyataannya, kita tidak bisa mengingkari bahwa sangat sedikit orang-orang yang sukses di dunia ini yang menjadi juara di masa sekolah. Bill Gates (pemilik Microsoft), Tiger Wood (pemain golf) adalah beberapa dari ribuan orang yang dianggap tidak berhasil di sekolah tetapi menjadi orang yang sangat berhasil di bidangnya. Kalau IQ ataupun prestasi akademik tidak bisa dipakai untuk meramalkan sukses seorang

anak di masa depan, lalu apa? Kemudian, apa yang harus dilakukan orang tua supaya anak-anak mempunyai persiapan cukup untuk masa depannya? Jawabannya adalah berprestasi dalam kecerdasan majemuk (Multiple Intelligence), dan bukan hanya prestasi akademik. Kemungkinan anak untuk meraih sukses menjadi sangat besar jika anak dilatih untuk meningkatkan kecerdasannya yang majemuk itu.

9 jenis kecerdasan

Dr. Howard Gardner, peneliti dari Harvard, pencetus teori Multiple Intelligence mengajukan 8 jenis kecerdasan yang meliputi (saya memasukkan kecerdasan spiritual walaupun masih diperdebatkan kriterianya):



1. cerdas bahasa – cerdas dalam mengolah kata;
2. cerdas gambar – memiliki imajinasi tinggi;
3. cerdas musik – cerdas musik, peka terhadap suara dan irama;
4. cerdas tubuh – terampil dalam mengolah tubuh dan gerak;
5. cerdas matematika dan logika – cerdas dalam sains dan berhitung;
6. cerdas sosial – kemampuan tinggi dalam membaca pikiran dan perasaan orang lain;
7. cerdas diri – menyadari kekuatan dan kelemahan diri;
8. cerdas alam – peka terhadap alam sekitar;
9. cerdas spiritual – menyadari makna eksistensi diri dalam hubungannya dengan pencipta alam semesta.

Gambar 4.9 Bermusik membentuk kecerdasan.

Sumber: Repro Image Bank

Membangun seluruh kecerdasan anak adalah ibarat membangun sebuah tenda yang mempunyai beberapa tongkat sebagai penyangganya. Makin sama tinggi tongkat-tongkat penyangganya, makin kokoh pulalah tenda itu berdiri. Untuk menjadi sungguh-sungguh cerdas berarti memiliki skor yang tinggi pada seluruh kecerdasan majemuk tersebut. Walaupun sangat jarang seseorang memiliki kecerdasan yang tinggi di semua bidang, biasanya orang yang benar-benar sukses memiliki kombinasi 4 atau 5 kecerdasan yang menonjol.



Gambar 4.10 Sumpah pelajar antikorupsi.

Sumber: www.wikipedia.com

Albert Einstein, terkenal jenius di bidang sains, ternyata juga sangat cerdas dalam bermain biola dan matematika. Demikian pula Leonardo Da Vinci yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam bidang olah tubuh, seni, arsitektur, matematika, dan fisika.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik saja tidak cukup bagi seseorang untuk mengembangkan kecerdasannya secara maksimal. Justru peran orang tua dalam memberikan latihan-latihan dan lingkungan yang mendukung jauh lebih penting dalam menentukan perkembangan kecerdasan seorang

anak. Jadi, untuk menjamin masa depan anak yang berhasil, kita tidak bisa menggantungkan pada sukses sekolah semata. Ayah ibu harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan dan mengembangkan sebanyak mungkin kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing anak.

Bangsa Indonesia dewasa ini sangat membutuhkan orang-orang yang berprestasi dalam segala bidang. Mereka diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan dan krisis bangsa. Misalnya, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, buruknya kesehatan masyarakat di banyak daerah, sarana pendidikan yang memprihatinkan, korupsi, merebaknya tindak asusila dalam masyarakat, dan penggunaan obat-obat terlarang yang makin mengkhawatirkan.

Lebih jauh, prestasi anak bangsa itu nantinya untuk mengejar keteringgalan dalam berbagai bidang dengan negara-negara lain. Pemerintah harus memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk menjadikan bangsa Indonesia naik peringkat dari negara berkembang menjadi negara maju dan modern. Pemerintah harus bertekad agar Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain terutama di Asia.

“Berikut ini salah satu kisah yang menceritakan bagaimana perjuangan seorang pemuda yang hendak menularkan ilmu yang dimilikinya kepada anak-anak petani di desanya. Kisah ini membuktikan bahwa prestasi bisa berwujud dalam bentuk pengabdian dan memberikan manfaat kepada lingkungan masyarakat sekitar. Justru di sini ditunjukkan bagaimana dengan bekal ilmu yang terbatas, ia memiliki keinginan yang kuat untuk mencerdaskan anak-anak petani agar bisa paham terhadap bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Saat ini bahasa Inggris memang sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar. Namun, mata pelajaran yang satu ini memang masih asing di telinga murid-murid SD apalagi bagi murid SD yang berada di pinggiran desa. Mendengar nama bahasa Inggris saja, anak-anak yang

biasa disebut anak petani di kampung sudah membayangkan bahwa pelajaran itu adalah mata pelajaran yang akan sulit dipelajari. Mereka sering menyebutnya bahasa luar negeri.



CAKRAWALA

Kusmayadi Sasmita (24), warga Kampung Arjasari RT 03/RW 06, desa/kecamatan Arjasari ini memberanikan diri untuk membuka wawasan orang kampung terhadap mata pelajaran yang sulit ini. Dia membuka suatu kelas privat bahasa Inggris secara cuma-cuma untuk anak-anak petani kampung yang berada di pinggiran Desa Arjasari. Kelas tersebut dibukanya sejak tiga bulan yang lalu dengan menggunakan fasilitas seadanya. Untuk ruang kelas dia menggunakan bale rukun warga yang usianya sudah uzur. Bukan meja dan kursi yang ditempati murid-muridnya untuk belajar, tetapi murid belajar dengan beralaskan anyaman tikar saja.

“Meskipun ngampar, yang terpenting anak-anak di kampung ini bisa menguasai bahasa Inggris. Minimal mengenal bahasa internasional ini,” ujar pemuda yang pernah juga mengenyam kursus Diroshah Quaran di LBSI Nur Al-Quaran Cimahi ini.

Biarpun dia tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, berbekal pengetahuan berbahasa Inggris yang dipelajarinya di Aliyah Al-Huda, Pameungpeuk, pemuda masjid ini berani menemui para petani untuk meminta izin agar anak mereka bisa ikut les bahasa Inggris secara gratis. (TJ, 8/11/06).

Dewasa ini semakin banyak peluang bagi setiap orang untuk berprestasi dan meraih hidup sukses dalam bidang olahraga, musik, sinetron, agama, sains, dan bisnis. Seiring dengan semakin banyaknya stasiun televisi dan media cetak yang mengudara dan terbit, terbuka peluang yang lebar untuk berkarir maupun membuat karya-karya sinematografi, musik, berita olahraga, hiburan, dan lain-lain. Begitu pula di bidang olahraga sepak bola, bola basket, bulu tangkis baik menjadi pemain, pelatih maupun yang lainnya dengan bayaran atau gaji yang menggiurkan.

Ajang pencarian bakat penyanyi profesional, pebulu tangkis, modeling, dai, siswa berprestasi, merupakan peluang yang baik untuk unjuk kemampuan bagi kalian dalam meraih prestasi tertinggi. Dalam ajang tersebut, semua potensi diri kalian dipertaruhkan. Kalian jelas harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, bakat yang unik dan bagus.

Persoalan awal yang kerap kali menghadang kita untuk meraih prestasi dan kesuksesan, sebenarnya datang dari diri sendiri. Kok bisa? Di dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari kita kerap kali menyepelkan diri kita sendiri. Misalnya, kita melontarkan kata, “Saya tidak bisa!”, “Saya tidak berbakat!”, “Lebih baik orang lain saja yang melakukannya, jangan saya!”, “Apakah saya mampu melakukannya?”, dan serangkaian pernyataan negatif lainnya. Pernyataan-pernyataan tersebut mulai sekarang harus



Gambar 4.11 Finalis menuju Liputan Enam, ajang pencarian bakat presenter.

Sumber: www.wikipedia.com

dibuang jauh-jauh jika kalian ingin berprestasi dan sukses. Alam bawah sadar yang negatif tersebut akan memperlemah mentalitas dan tidak jarang menjadi kenyataan sehingga ada ungkapan, “kalian adalah apa yang kalian pikirkan.” Artinya, ketika kalian memandang diri kalian negatif maka pandangan yang negatif tersebut biasanya menjadi kenyataan.

Potensi yang dimiliki setiap orang sangatlah luar biasa. Tuhan telah menjadikan setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Manusia diberi akal untuk berpikir dan berkreasi serta hati untuk membedakan yang baik dan buruk.



Gambar 4.12 Tes masuk AFI/Indonesian Idol/ melamar pekerjaan.

Sumber: www.wikipedia.com

Buatlah rencana dan tetapkan tujuan serta target prestasi yang ingin diraih oleh kalian sesuai bidang yang kalian sukai. Jangan pernah memilih bidang yang tidak kalian sukai, karena hal itu pasti akan memberikan pengaruh buruk di kemudian hari, seperti kalian tidak tekun dan setengah-setengah dalam menjalani bidang yang tidak kalian sukai tersebut. Sudah pasti karena kalian menjalaninya setengah hati, hasilnya pun tidak akan bagus. Malahan bisa jadi kalian berhenti di tengah jalan alias tidak meneruskan bidang yang tidak kalian sukai itu.

Dalam kaitannya dengan bakat ini, kalian sebaiknya meminta arahan kepada guru bimbingan dan konseling di sekolah kalian. Katakan kepadanya bahwa kalian ingin mengetahui bakat dan minat dengan cara mengikuti psikotes. Apapun hasil psikotes akan memberikan petunjuk atau arahan bagi kalian tentang bakat dan permintaan yang sebaiknya kalian ambil untuk ditekuni. Dengan cara seperti itu, peluang kalian untuk

meraih prestasi tertinggi semakin besar. Parahnya, di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia memang masih sedikit penerapan metode penelusuran minat dan bakat melalui psikotes, kecuali ketika akan memasuki bangku perguruan tinggi (PT). Setelah itu, siapkan perangkat untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu, ubahlah cara memandang diri kamu sendiri dari mulai sekarang dengan pandangan yang positif dan penuh motivasi. Tanamkan dalam diri kata-kata motivasi berikut berulang-ulang, seperti “Saya pasti bisa”, “Saya harus juara”; “Saya adalah pemenang, bukan pecundang!”

Penetapan tujuan akan membantu kamu memetakan potensi yang dimiliki olehmu. Setelah tujuan ditetapkan, tentukan pula waktu dan target yang dibutuhkan, perangkat yang mesti disediakan, biaya yang harus dikeluarkan, dan tahap-tahap proses yang akan dilalui dalam mewujudkan tujuan tersebut. Tanpa tujuan yang jelas rasanya sangat sulit bagi siapapun untuk meraih prestasi dalam bidang apapun.



CAKRAWALA

“Kompetisi Dibangun Sejak Dini”

Mempunyai anak berprestasi menjadi dambaan setiap orang tua. Namun, bagi sebagian orang, mencetak anak berprestasi tidaklah mudah. Jangankan untuk menjadi nomor satu, untuk ikut dalam “pertandingan” atau kompetisi saja banyak anak yang tidak bersemangat.

Bahkan, sebagian anak, yang sebenarnya dari sisi usia sudah cukup mengerti tentang kewajibannya belajar, tetap harus didorong orang tua meski hanya sekadar mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya.

Menurut psikolog dari Universitas Indonesia, Lucia RM Royanto, memang ada anak-anak yang sudah memiliki kesadaran pribadi akan kebutuhan untuk belajar. Kesadaran ini tidak hanya untuk pelajaran di kelas, tetapi juga untuk semua hal. Misalnya, jika dia membaca sebuah topik, dia akan mencari buku-buku apa pun yang berkaitan dengan topik itu. Dia baru puas setelah mendapatkan semua informasi mengenai topik itu dari berbagai sudut.

Anak-anak seperti ini bisa dikatakan sebagai anak yang bisa mengatur dirinya sendiri untuk belajar. Dia tahu kapan harus belajar, kapan harus berhenti, dan kapan tidak perlu belajar. Anak seperti ini bukan berarti dia tipe anak yang kurang pergaulan lho,”kata Lucia.

Santai

Ada juga anak-anak yang lebih memilih untuk santai dan biasanya tidak mempunyai kesadaran untuk berkompetisi. Ada juga anak yang menolak berkompetisi karena takut menerima kekalahan atau khawatir dianggap terlalu berambisi oleh teman-temannya.

Menurut Lucia, kesadaran seperti ini bukan kesalahan anak semata karena kesadaran untuk belajar merupakan kesadaran eksternal. Maksudnya, kesadaran ini harus ditanamkan sejak kecil, terutama bagi anak-anak yang kebutuhan akan pencapaiannya rendah.

“Kesadaran ini ditanamkan sejak anak masih kecil, terutama pada awal masa sekolah. Misalnya, orang tua selalu mendorong anak untuk belajar, orang tua selalu memeriksa buku agenda dan memastikan anak mengerjakan semua tugasnya. Biasanya anak-anak membutuhkan perhatian orang tua ketika dia duduk di kelas satu sampai tiga SD,” tutur Lucia.

Sementara anak dengan usia yang lebih besar diharapkan kesadaran yang ditanamkan tersebut sudah menjadi bagian internal dari dirinya. Dengan demikian, orang tua tidak perlu lagi mengejar-ngejar anak untuk belajar. Namun, dalam praktiknya, ternyata sering kali orang tua tidak konsisten sehingga kesadaran ini tidak tertanam dengan baik.

“Misalnya, orang tua hanya pada tahap awal saja menekankan anak untuk belajar, setelah itu lupa. Jadi, tidak ada konsistensi dari orang tua. Selain itu, sebagian orang tua juga sering membanding-bandingkan anaknya dengan anak lainnya. Ini menyakitkan hati anak,” ujar Lucia.

Apabila orang tua ingin menumbuhkan rasa kompetisi pada anak, sebaiknya ajaklah anak berkompetisi dengan dirinya sendiri.

“Katakan kepada anak, sebenarnya dia bisa asalkan lebih teliti atau lebih berkonsentrasi. Ini jauh lebih baik dan bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Dengan demikian, anak mempunyai motivasi berprestasi, tidak peduli dengan segala macam cap teman-temannya yang mungkin menyebut dia terlalu ambisius,” kata Lucia menegaskan.

Selain itu, orang tua sebaiknya juga mencari kelebihan dan kekurangan anak. Kelebihan yang ada didorong semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan anak.

“Orang tua harus melihat realita dengan bijak, jangan terlalu tinggi meletakkan harapan sehingga, ketika anak tidak bisa mencapainya, orang tua justru akan menekan anak. Orang tua juga jangan meletakkan harapan terlalu rendah karena akibatnya anak tidak memiliki daya juang,” ujarnya. (Fisik@net).

Oleh karena itu, kenali, gali, dan asah terus potensi yang dimiliki olehmu sehingga kelak kalian menjadi orang berprestasi dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Berprestasi tidak hanya menjadi milik para olahragawan saja, tetapi juga bisa dicapai oleh siapapun termasuk kalian. Tunjukkan bahwa kalian juga dapat berprestasi sesuai keahlian dan kemampuan kalian, minimal di lingkungan sekitar kalian atau yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat nasional maupun internasional. "Be the Best!" Itulah kata-kata yang selalu harus kalian tanamkan dalam diri kalian setiap saat. Jadikanlah setiap aktivitas, setiap waktu, dan kesempatan yang ada untuk menjadi yang terbaik bagi kalian dan masa depan kalian.

C. Peran Serta dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Diri Sesuai Kemampuan Demi Keunggulan Bangsa



Gambar 4.13 Meraih prestasi.

Sumber: www.wikipedia.com

Menjadi orang berprestasi merupakan dambaan setiap orang. Kita tidak perlu membayangkan bahwa berprestasi berarti kita harus seperti Liem Sioe Liong, Andre Agassi, atau Susi Susanti. Kita dapat berprestasi tinggi di bidang yang kita tekuni sekarang.

Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi agar rakyat berprestasi pada bidangnya masing-masing. Hal ini dengan jelas termaktub dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945 berikut.

1. Pasal 27 (2) : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
2. Pasal 28A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya".
3. Pasal 28 C (1) : "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia".
4. Pasal 28C : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".



Gambar 4.14 Penari tradisional belajar tiada henti.

Sumber: www.wikipedia.com



Gambar 4.15 Belajar sejak dini menggapai cita-cita.

Sumber: www.wikipedia.com



Gambar 4.16 Seseorang sedang memperbaiki komputer salah satu simbol ketekunan dan kerja keras.

Sumber: Repro Image Bank

5. Pasal 28F : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Pasal 28 H : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Landasan hukum tersebut menunjukkan bahwa rakyat memiliki kebebasan penuh dalam melakukan aktivitasnya selama tidak melanggar hukum agama dan hukum positif negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, rakyat memang memiliki hak terhadap akses informasi, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan, serta perlindungan.

Terkait dengan hal itu, meraih prestasi memang membutuhkan beberapa syarat, antara lain:

1. tekun
2. tidak mudah patah semangat alias gigih
3. melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan sepenuh hati;
4. tentukan prestasi yang ingin diraih dalam bidang apa agar fokus, buat target/skedul dan langkah-langkah untuk mencapainya, apa saja yang harus dipersiapkan, dan berdisiplinlah dengan target yang telah dibuat;
5. tawakal (berusaha seoptimal mungkin, berdoa, dan serahkan hasilnya pada keputusan Tuhan);
6. tanamkan pada diri, kata-kata yang memberi motivasi dan semangat untuk mencapai prestasi tersebut atau tempelkan foto orang-orang yang berprestasi agar mereka selalu menjadi inspirasi dalam meraih prestasi;

7. berlatih terus-menerus, mengasah kemampuan;
8. selalu belajar terus-menerus tiada henti untuk memperdalam dan mengasah kemampuan di bidang/aktivitas yang kamu geluti sekarang.



Gambar 4.17 Seorang pemuda yang sedang mengkhayal dan malas-malasan sambil mengisap rokok.

Sumber: Repro Image Bank

Dengan bekal seperti itu, kalian akan makin terlatih dan akhirnya kelak menjadi seorang profesional dan berprestasi pada bidang yang kalian tekuni. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kalian jangan pernah mempunyai pikiran ingin ‘pindah jalur’ ke bidang atau aktivitas yang tidak pernah kalian sukai dan bukan menjadi minat atau hobi kalian. Karena hal itu akan membebani pikiran kalian dan kelak kalian pasti menjalankan bidang atau aktivitas tersebut setengah hati.

Selain faktor-faktor yang menjadi prasyarat untuk mencapai prestasi, perlu diwaspadai juga faktor-faktor yang biasanya menjadi penghambat dalam meraih prestasi, seperti:

1. malas;
2. tidak menentukan tujuan, target, dan langkah-langkah untuk mencapainya;
3. tidak berdisiplin;
4. mudah patah semangat;
5. gengsi;

Paling tidak ada empat tolok ukur keberhasilan atau prestasi seseorang dalam hidup, yaitu sebagai berikut.

1. Tolok ukur ilmu pengetahuan (kognitif-IQ)

Tuhan sebenarnya telah menghamparkan ilmu pengetahuan di dunia ini melalui karya cipta-Nya. Dari langit teratas sampai bumi dan laut terdalam, dari ujung dunia paling timur sampai ujung utara, selatan, dan barat, Tuhan menanamkan ilmu baik dalam bentuk manusia, hewan, alam dan seisinya, tumbuh tumbuhan, dan sebagainya. Tinggal kemauan manusia saja untuk menggali ilmu-ilmu tersebut karena manusia telah diberi kelebihan, yaitu akal.



Gambar 4.18 Habibie, si jenius yang membanggakan.

Sumber: Repro Image Bank

Akal diciptakan agar manusia terus-menerus mencari dan memperluas ilmu pengetahuannya serta dengan akal manusia menggali potensi diri agar lebih bernilai martabatnya daripada binatang. Oleh karena itu, belajar di bangku sekolah belumlah cukup bagi kamu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kamu perlu terus menggali ilmu di manapun dan mengasah otak atau IQ (Intelligent Quotient) kamu agar kamu menjadi orang cerdas secara intelektual yang menguasai ilmu dengan benar dan mendalam.

Tolok ukur kepintaran otak atau intelektual seseorang dapat dilihat dari prestasi akademiknya di sekolah atau di Perguruan Tinggi (PT).

2. Tolok ukur sikap dan kepribadian (afektif/EQ)



Gambar 4.19 Seorang pejabat tinggi yang rendah hati turun tangan membantu korban bencana.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Sikap atau EQ (Emotional Quotient/kecerdasan sikap) dewasa ini sangat dibutuhkan karena berdasarkan penelitian para ahli bahwa justru kecerdasan sikap menunjang 80% kesuksesan hidup manusia, selebihnya baru kecerdasan otak. Tuhan telah memberi potensi yang baik dan buruk kepada setiap manusia. Tinggal bagaimana manusia itu sendiri menggunakan potensinya tersebut, apakah akan sebaliknya. Potensi yang baik ini akan terpelihara dengan baik jika bergaul dengan lingkungan yang positif pula.

Tolok ukur sikap ini dapat dilihat dari kerendahan hati seseorang, pandai membawa diri dalam bergaul dengan tetangga, bersikap dan berperilaku baik atau tidak emosional tetapi rasional, dan tidak suka pamer walaupun seseorang itu sangat pintar/jenius dan kaya raya.

3. Tolok ukur keterampilan (psikomotorik)



Gambar 4.20 Para pekerja di pabrik mobil.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Setiap manusia mutlak memiliki keterampilan dalam hidupnya. Faktanya orang-orang yang memiliki keterampilan tinggilah yang dapat meraih sukses, baik sukses dalam pendidikannya, dalam bisnis, olahraga, kesenian, maupun yang lain. Untuk mendapatkan keterampilan jelas membutuhkan ilmu pengetahuan, kerja keras untuk mendapatkannya, tidak gengsi, dan memiliki prinsip hidup yang tegas dan penuh percaya diri.

Tolok ukur ini mudah dilihat karena berkaitan dengan keahlian seseorang dalam bidang tertentu, seperti Liem Sioe Liong (pengusaha sukses), Rudi Chaerudin (jago masak), Ramli dan Biyan (perancang mode), David Beckham (ahli sepak bola), dan lain-lain.

4. Tolok ukur spiritual

Agama jelas merupakan faktor yang tidak boleh diremehkan. Agama akan mengarahkan hidup manusia pada kebaikan. Dengan agama manusia menyadari dirinya adalah ciptaan Tuhan, serta meyakini bahwa dibutuhkan bekal dalam menggapai kehidupan yang abadi di akhirat kelak setelah episode hidup di dunia berakhir. Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi kunci penting dari prinsip spiritualitas agar manusia tidak menggantungkan hidupnya pada manusia lain. Tuhan sebagai pencipta sekaligus pemelihara alam semesta ini. Manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi diberi amanah untuk mengelola alam semesta dan isinya ini dengan baik.



Gambar 4.21 Umat muslim sedang memanjatkan doa.

Sumber: www.kompascybermedia.com

Tolok ukur ini yang dapat dilihat hanya ketekunan seseorang dalam beribadah kepada Tuhan dan kesalehan sosialnya, selebihnya tidak bisa dinilai kecuali antara seseorang tersebut dengan Tuhannya. Kesalehan sosial yang dimaksud, seperti suka beramal/bersedekah, suka menolong anak yatim, membangun tempat ibadah, dan lain-lain.



“Pelajar SMA Menangkan Festival Film Inggris”

Sasmita Kusumastuti dan Rininta Putri Nugroho dari SMA Tarakanita 1 Jakarta serta Fatimah Fitri Amatullah dan A Rahmad Taufik dari SMAN 17 Makassar terpilih sebagai pemenang Presentation Competition Clean & Clear British Film Festival 2005, Boys & Girl. Atas keberhasilan itu, mereka akan berangkat ke Inggris selama 10 hari sebagai duta film dan budaya Indonesia bersama sutradara Indonesia terkenal, Riri Riza.

Keempat siswa ini membawa satu film Indonesia yang akan diperkenalkan kepada murid-murid sebaya mereka untuk selanjutnya melakukan diskusi mengenai komparasi pesan-pesan atau permasalahan gender dalam film Indonesia dan Inggris. Aktivitas tersebut diharapkan akan menjadi ajang tukar pikiran dan peningkatan pemahaman antarbudaya melalui sudut pandang anak muda Inggris dan Indonesia. Para pemenang juga akan mengunjungi British Film Institute, museum, BBC, dan menonton theater.

Sasmita, Rininta, Fatimah, dan Rahmat dinyatakan sebagai pemenang setelah mengalahkan finalis lainnya dalam grand final yang diselenggarakan di Jakarta, beberapa waktu lalu. Mereka adalah Yosef Pramudyo Noki M dan Ayu Lidya R (SMA 6 Yogyakarta), Jamal Said Bahasyum dan Yulida Safitri (SMA 5 Malang), serta Ulina dan Shaly (SMA Hang Kesturi Medan). Festival Film Inggris yang diselenggarakan oleh British Council dan Clean & Clear ini bertujuan untuk menginformasikan pengertian mengenai gender melalui film media.

Selain itu, untuk mendapatkan informasi mengenai perbandingan gender dan nilai budaya dalam film Indonesia dan Inggris, di samping menstimulasi kesadaran agar lebih kritis serta mengangkat sisi toleransi mengenai gender di antara masyarakat muda Indonesia.

Dalam kompetisi ini, kata manager public relations British Council Jakarta, Mona Monika, peserta diharuskan menulis esai mengenai bagaimana gender direpresentasikan dalam film Inggris dan Indonesia. Mereka harus memilih satu dari tiga film Indonesia yang terdiri atas, Mengejar Matahari, 30 Hari Mencari Cinta, dan Arisan, serta dari dua film Inggris: Bend It Like Beckham dan Billy Eliot.

Pada grand final diberikan waktu 15 menit untuk presentasi dan 20 menit tanya jawab. Karya tulis dan presentasi dalam bahasa Inggris. Kriteria penjurian, antara lain kemampuan membawakan presentasi, kemampuan berbahasa Inggris, dan percaya diri. (Republika Online).

Seperti telah kita ketahui bahwa Indonesia sudah sejak kemerdekaan sampai sekarang, terus melakukan Pembangunan Nasional secara berkesinambungan. Pelita demi Pelita telah dilalui dan dilaksanakan, tetapi tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat



Gambar 4.21 Masyarakat miskin rawan terkena penyakit.

Sumber: www.kompascybermedia.com

yang adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan, masih belum tercapai. Kita dapat menyaksikan sendiri hampir setiap waktu saudara-saudara kita masih hidup dalam keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, kekurangan pangan, kekurangan air bersih, terkena berbagai penyakit yang mematikan, seperti busung lapar, kurang gizi, malaria, flu burung, dan sebagainya. Untuk mengatasi dan segera keluar dari persoalan tersebut dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan juga peran serta seluruh rakyat. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu dituntut untuk perhatian dan peka melihat kondisi masyarakat seperti itu. Kita tidak cukup hanya mengasihani mereka, tetapi juga harus berbuat sesuatu untuk mereka.

Jelasnya, bangsa Indonesia dewasa ini sedang membutuhkan orang-orang yang sanggup bekerja keras dan cerdas serta berprestasi dalam semua bidang kehidupan sehingga kelak dapat mengatasi masalah-masalah sosial tadi dengan cepat dan tuntas. Orang-orang yang berprestasi dibutuhkan, selain untuk meningkatkan kualitas daya saing SDM kita pada level internasional juga diharapkan dapat mewarnai khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya diharapkan dapat membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan moral.

Lalu, prestasi apa yang dapat disumbangkan olehmu untuk bangsa dan negara ini? Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk memberikan sumbangsih pada bangsa seperti orang-orang terkenal dan kaya. Apa yang dapat kita lakukan sekarang dan dalam bidang apapun kita beraktivitas atau bekerja maka lakukanlah yang terbaik demi masa depan kita sendiri dan orang-orang yang membutuhkan tenaga, pikiran, keahlian, dan kemampuanmu di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Hal itu sudah cukup sebagai bagian peran serta kita dalam pembangunan. Alangkah lebih baiknya, dengan keahlian dan bakat yang kita miliki, dapat menorehkan 'tinta emas' prestasi pada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu pada tingkat internasional dan dunia. Sekali lagi, bangsa ini sekarang sedang membutuhkan karya-karya dan prestasi-prestasi terbaik yang lahir dari anak bangsanya sendiri.

RANGKUMAN

1. Berprestasi dapat diraih oleh siapapun dalam bidang apapun.
2. Bangsa Indonesia dewasa ini sedang membutuhkan orang-orang yang berprestasi dalam segala bidang untuk membawa Indonesia bangkit dari keterpurukan.
3. Meraih prestasi tidaklah sulit asal kita mengetahui faktor-faktor yang menjadi prasyarat tercapainya prestasi dan menghindarkan diri dari faktor-faktor yang dapat menghambat gagalnya mencapai prestasi.
4. Galilah seoptimal mungkin potensi yang ada dalam dirimu, arahkan sesuai minatmu, dan tekuni aktivitas tersebut secara terus-menerus secara mendalam sampai kamu menjadi ahli atau pakar pada bidang yang kamu geluti tersebut.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu!

- A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!
1. Prestasi dapat diraih dengan cara
 - a. bersantai
 - b. bekerja keras dan cerdas
 - c. gengsi
 - d. tidak fokus
 2. Dalam meraih prestasi sebaiknya kita
 - a. fokus pada satu bidang
 - b. mengetahui garis besarnya saja
 - c. menguasai beberapa bidang
 - d. menguasai sekadarnya
 3. Jika seseorang berprestasi tinggi di bidang sains sekaligus rendah hati atas prestasinya tersebut maka orang tersebut bisa dikategorikan sudah cerdas secara
 - a. intelektual
 - b. spiritual
 - c. emosional
 - d. psikomotrik

4. Tokoh dari Indonesia yang berprestasi di dunia dalam bidang kedirgantaraan adalah....
 - a. Soeharto
 - b. B.J. Habibie
 - c. Soekarno
 - d. Susilo Bambang Yudhoyono
5. "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya" adalah isi dari ... UUD 1945.
 - a. Pasal 27 (2)
 - b. Pasal 28C (1)
 - c. Pasal 28C (2)
 - d. Pasal 28F
6. Kalau seorang siswa menjuarai lomba cerdas cermat menunjukkan bahwa orang tersebut baru berprestasi/cerdas secara
 - a. intelektual
 - b. spiritual
 - c. emosional
 - d. psikomotrik
7. Prasyarat untuk meraih prestasi di antaranya sebagai berikut, kecuali
 - a. tidak mudah patah semangat alias gigih;
 - b. tidak disiplin
 - c. melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan sepenuh hati
 - d. berlatih terus-menerus, mengasah kemampuan;
8. Faktoryangkerapkalinmenghambatseseorangdalammeraihprestasiadalahsebagai berikut, kecuali
 - a. gengsi
 - b. malas
 - c. merasa pandai
 - d. tawakal
9. Prestasi hanya dapat diraih dengan
 - a. mengusahakan dengan segala cara
 - b. cita-cita
 - c. kerja keras
 - d. modal yang banyak
10. Selainpandaimenyanyi, ternyataJoshuaselalumenjadirankingsatudisekolahnya. Dalam hal ini Joshua mempunyai kecerdasan
 - a. cerdas bahasa dan cerdas musik
 - b. cerdas musik dan cerdas alam
 - c. cerdas tubuh dan cerdas bahasa
 - d. cerdas musik dan cerdas matematika/logika

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa berprestasi itu sangat penting?
2. Mengapa bangsa Indonesia tidak banyak melahirkan orang-orang yang berprestasi?
3. Prestasi apa yang dapat kita berikan kepada bangsa dan negara?
4. Faktor-faktor apa saja yang biasanya menghambat seseorang dalam meraih prestasi?
5. Faktor-faktor apa saja yang dapat menunjang seseorang dalam meraih prestasi?



TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Administrasi Negara! Salinlah ke dalam buku tugasmu!

Kognitif	:
Afektif	:
Psikomotorik	:
Khazanah	:
Komitmen	:
Kolektif	:
Otoritatif	:
Permisif	:
Otoriter	:



KEGIATAN

1. Carilah artikel dan foto di surat kabar atau majalah tentang orang-orang berprestasi di Indonesia atau di dunia dalam bidang apapun yang kamu kagumi. Berilah komentar atas prestasi yang telah diraih olehnya, serta ceritakan pula bagaimana sejarah dan perjuangan orang tersebut sebelum meraih prestasi!
2. Buatlah sebuah proposal sederhana yang di dalamnya berisi tujuan atau prestasi yang ingin kamu raih. Setelah ditetapkan tujuannya, tentukan targetnya (berapa lama prestasi tersebut akan diraih). Buat target tersebut dalam bentuk time schedule hari per hari atau per minggu. Tentukan langkah demi langkah/strategi untuk mencapainya. Siapkan prasarana untuk meraih prestasi tersebut. Kini aktivitas tersebut siap dijalankan. Setelah dijalankan, lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas atau prestasi yang hendak kamu raih tersebut. Apakah ada penyimpangan dari target sehingga prestasi gagal dicapai atau bagaimana. Libatkan orang tua atau temanmu dalam melakukan evaluasi tersebut.

EVALUASI SEMESTER 2

- A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!
1. Globalisasi generasi kedua disebut juga globalisasi
 - a. antarnegara
 - b. antarperusahaan
 - c. antarindividu
 - d. antarlembaga
 2. Runtuhnya Tembok Berlin, maraknya internet, dan blogging merupakan ciri globalisasi
 - a. antarnegara
 - b. generasi kedua
 - c. generasi ketiga
 - d. generasi keempat
 3. Pesawat CN-235 produksi IPTN merupakan salah satu pengaruh globalisasi di bidang
 - a. sains-teknologi
 - b. agama
 - c. sosial
 - d. hukum
 4. Hubungan suatu negara dengan banyak negara disebut
 - a. bikameral
 - b. bilateral
 - c. trilateral
 - d. multilateral
 5. Politik luar negeri Indonesia mempunyai prinsip
 - a. bebas tanpa batas
 - b. bebas dan aktif
 - c. bebas bertanggung jawab
 - d. aktif dan positif
 6. Organisasi lingkungan hidup internasional salah satunya yang terkenal adalah
 - a. Greenpeace
 - b. KontraS
 - c. Walhi
 - d. ICW
 7. Government to government merupakan istilah yang menunjukkan hubungan
 - a. antarpemerintah
 - b. antarkepolisian
 - c. antar-LSM
 - d. antarorganisasi internasional
 8. "Segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan...." merupakan bunyi dari
 - a. UUD 45 Pasal 1 (1)
 - b. Batang Tubuh UUD 1945
 - c. UUD 45 Pasal 2 (1)
 - d. Pembukaan UUD 1945
 9. Organisasi negara-negara pengeksport minyak adalah
 - a. ASEAN
 - b. GNB
 - c. OPEC
 - d. IMF

10. Konsep 3C bertujuan agar anak belajar dengan menyenangkan sehingga bisa berprestasi. Konsep 3C terdiri atas
 - a. children, content, context
 - b. content, communication, coordination
 - c. children, communcation, context
 - d. context, communication, coordination
11. Menurut DR. M. Enoch Markum, pola asuh yang tepat agar anak berprestasi adalah memakai pola
 - a. permisif
 - b. otoritatif
 - c. otoriter
 - d. kondusif
12. Konsep kecerdasan majemuk dikemukakan oleh
 - a. Arief Rachman
 - b. Dadang Hawari
 - c. M. Enoch Markum
 - d. Andyda Meilala
13. Di Jepang, istilah koyoiku mama mengandung arti
 - a. ayah pendidik
 - b. guru pendidik
 - c. ibu pendidik
 - d. orang tua pendidik
14. "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" merupakan bunyi UUD 1945
 - a. Pasal 27 (1)
 - b. Pasal 28A
 - c. Pasal 29 (1)
 - d. Pasal 30 (2)
15. Dalam suatu pembelajaran, aspek kognitif disamakan dengan
 - a. pengetahuan
 - b. keterampilan
 - c. sikap
 - d. kecerdasan
16. Buku *The World is Flat* ditulis oleh
 - a. Mac Iver
 - b. Thomas L. Friedman
 - c. Roger H. Soltau
 - d. Plato
17. Mengambil data atau gambar dari internet dilakukan dengan cara
 - a. chatting
 - b. e-mail
 - c. blogg
 - d. download
18. Komunikasi tertulis via internet antara satu orang dengan orang lain disebut
 - a. chatting
 - b. e-mail
 - c. blogg
 - d. download
19. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 adalah undang-undang tentang
 - a. Zona Ekonomi Eksklusif
 - b. Perikanan
 - c. Kelautan
 - d. Perhubungan Laut

20. Pencetus gagasan tentang kecerdasan majemuk (Multiple Intelligence) adalah
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a. Mac Iver | c. Roger H. Soltau |
| b. Howard Gardner | d. Thomas L. Friedman |

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Apa yang menjadi ciri-ciri globalisasi? Jelaskan!
2. Apa pendapatmu soal artikel yang terdapat dalam rubrik "Cakrawala", Kompetisi Dibangun Sejak Dini, pada halaman 77?
3. Apa pendapatmu soal artikel yang terdapat dalam rubrik "Cakrawala" Pelajar SMA Menangkan Festival Film Inggris, pada halaman 84?
4. Apa yang dimaksud kecerdasan majemuk? Jelaskan!
5. Mengapa kecerdasan sikap (EQ) sangat menentukan kesuksesan hidup seseorang?

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmosudirjo, Prayudi. 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Prasetyo. 2001. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusnadi, Moh. dan Homily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Latief, Abdul. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Bagir. 2003. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Jakarta: UII Press.
- Pasha, Mustafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Simorangkir, J.C.T. 1984. *Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kedudukan dan Persamaan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Sotami, Siti. A. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Jakarta: Kurnia.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2000. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Widarta. 2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Wheare, K.C. 2003. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka.

B. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil Amandemen.
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Bandung: Citra Umbara.
3. Undang-Undang RI Nomor 32 tentang Penyiaran. Bandung: Umbara.
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bandung: Citra Umbara.
5. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jakarta: Sinar Grafika.
6. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika.
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Mini Jaya Abadi.

C. MEDIA MASSA

Fisik@net, Forum Keadilan, Indomedia.com, Kompas, Kompas.com, PikiranRakyat.com, Pikiran Rakyat, Republika online, Tempo Interaktif. Tempo, Tribun Jabar, dan beberapa situs internet lainnya.

GLOSARIUM

Area	: wilayah, daerah
Kontribusi	: sumbangsih
Negara	: organisasi terbesar yang menghimpun rakyat dan kehendak rakyat
Konstitutif	: telah terpenuhinya syarat-syarat utama/pokok secara konstitusional
deklaratif	: syarat tambahan yang bersifat pemberitahuan kepada masyarakat internasional
konvensi	: peraturan tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama
de facto	: berdasarkan fakta/bukti
de jure	: berdasarkan hukum/yuridis
KNIP	: lembagasementarasebelumterbentuknyaparlemen/DPRpada tahun 1945
transnasional	: lintas bangsa
terorisme	: istilah suatu gerakan/perbuatan meneror, merusak, mengancam keamanan
asusila	: tidak bermoral
globalisasi	: proses yang bersifat mendunia
nonformal	: tidak resmi
ZEE	: wilayah ekonomi yang diukur dari 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia
TNI	: organisasi tertinggi yang menghimpun kekuatan militer untuk pertahanan dan keamanan negara
NAD	: sebutan Propinsi Aceh setelah dijadikan sebagai wilayah otonomi khusus
provokasi	: tindakan memancing/menantang
eksodus	: masyarakat yang ke luar wilayahnya secara besar-besaran karena suatu sebab
separatisme	: gerakan pemisahan wilayah/negara
Otda	: istilah kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
BPD	: Badan Perwakilan Daerah, semacam DPRD atau lembaga perwakilan di tingkat desa kebijakan publik: kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat
anarki	: kacau-balau, sewenang-wenang
IT	: information technology, istilah untuk teknologi informasi
tren	: kecenderungan, mode

Internet	: perangkat atau media informasi berbasis satelit yang konektivitas
Outsourcing	: maklon, menyerahkan pekerjaan ke luar/ke pihak lain
e-mail	: istilah surat yang dikirim via internet
bilateral	: hubungan suatu negara dengan satu negara lain
multilateral	: hubungan suatu negara dengan beberapa negara lain
inovasi	: penemuan baru
kompetitif	: semangat bersaing
Greenpeace	: organisasi nirlaba/LSM dunia yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup
G to G	: hubungan antar pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain
logika	: berlandaskan akal, otak, pikiran
visual	: terlihat/tampak nyata oleh mata
linguistik	: ilmu yang berhubungan dengan tata bahasa
naturalis	: bersifat alami
interpersonal	: hubungan seseorang dengan orang lain
intrapersonal	: hubungan seseorang dengan diri sendiri/pemahaman terhadap diri sendiri
spiritual	: istilah yang berkaitan dengan keagamaan
on line	: langsung tersambung, sedang mengudara
otoriter	: semena-mena
otoritatif	: menerapkan kendali, memberi ruang untuk berkembang
permissive	: serba boleh, serba bebas
profesional	: ahli/pakar dalam suatu bidang
pornografi	: istilah untuk gambar-gambar jorok, mengumbar aurat

INDEKS

A

agresi 1, 12, 56
 akses 80
 ancaman dari dalam 1, 7, 10, 17
 ancaman dari luar 10, 11, 12

B

bela negara 1, 8, 14, 16, 17, 21
 berdaulat 3, 6, 11, 17
 bilateral 49

D

daerah 6, 14, 25, 33, 44, 74, 93
 daerah otonom 23, 25, 27, 41
 de facto 7, 93
 de jure 7, 93
 deklaratif 3, 93
 demokrasi 23, 25, 29, 31, 34, 38, 53, 58
 demokratis 24, 37, 39, 57, 68
 diplomasi 56
 disintegrasi 17
 DPRD 21, 22, 27, 28, 30, 33, 36, 38

E

efektif 14, 66, 68, 69
 eksekutif 6, 30, 32
 eksistensi 73

F

fiskal 26

G

globalisasi 8, 17, 49, 51, 57

H

hak asasi 32, 57
 hukum 3, 5, 24, 31, 38, 80

I

ideologi 10, 16, 51, 53
 Indonesia 3, 7, 24, 35, 55, 77
 internet 3, 51, 52, 53, 59
 intervensi 16, 56

K

kebijakan 10, 21, 23, 27, 33
 kebijakan publik 32, 33, 34, 38
 kedaulatan 1, 4, 6, 9, 11, 12, 17
 kompetisi 34, 51, 52, 53, 77, 78
 konflik 55
 konstitutif 3
 kreatif 57
 kritis 84

L

legislatif 6, 7, 26, 32, 33

M

manajemen 57
 martabat 32
 modern 8, 23, 67, 74
 moneter 26
 motivasi 77, 78, 80

N

Negara 3, 7, 10, 11, 15, 24, 29, 56

O

orde baru 13, 23, 41
 organisasi 3, 6, 13, 15, 17, 24, 36, 54, 55
 otonomi 21, 23, 26, 37, 39
 otonomi daerah 21, 25, 32, 37, 39

P

pajak 7, 8, 21, 32
 partisipasi 1, 3, 21, 32, 38

PBB 5, 16, 55
pembelajaran 14, 66
pemerintah 1, 7, 21, 33, 41, 67
pemerintah daerah 21, 24, 29, 37, 41
pemerintah pusat 21, 23, 38, 41
penalaran 70, 71
pendidikan 40, 57, 67, 71, 80
politik 8, 12, 55, 56
potensi 3, 11, 35, 59, 65, 77
Prestasi 63, 65, 67, 72
profesi 67
profesional 12, 41, 57, 75
publik 21, 26, 32, 34, 39

R

rakyat 3, 6, 9, 13, 14, 35, 79
rakyat semesta 8, 9, 14
rasional 70, 82
reformasi 15
retribusi 26

S

selektif 59
semesta 8, 9, 14, 17, 73, 83
staat 3
stabilitas 12
state 3
swadaya 36

T

teknis 31
telekomunikasi 51, 54, 57
teritorial 5, 6, 11
transparan 37, 57

W

wawasan 37, 75
wilayah 2, 4, 5, 7, 11, 21

Y

yudikatif 6

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CATATAN

[illegible]

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SMP/MTs Kelas IX

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya. Tahukah kalian maksud kalimat tersebut? Kita sebagai bangsa yang besar, dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, akan lebih besar dan terhormat jika senantiasa menghormati para pahlawan bangsa.

Bagaimana cara menghormati para pahlawan bangsa itu? Cukupkah kita hanya dengan menabur bunga di pusara makam para pahlawan? Tentu saja tidak! Bahkan tindakan itu sebenarnya hanya sebagai simbolisasi saja. Hal yang lebih penting dari tindakan itu adalah menghargai pahlawan dengan cara meneladani tindakannya dan meneruskan perjuangannya.

Kalian sebagai generasi muda, kelak akan meneruskan tongkat estafet menuju kemajuan bangsa ini. Sepantasnya kalian selalu giat belajar dan berlatih. Kalian dapat berkarya dalam segala bidang untuk mengisi kemerdekaan. Isilah kemerdekaan ini dengan prestasi. Dengan begitu, kalian tidak sekadar menghargai pahlawan, tetapi kalian kelak juga akan dihargai sebagai pahlawan oleh seantero anak negeri.

Jadilah kalian pahlawan kecil yang akan membawa bangsa ini menuju kemajuan!

ISBN 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-890-2

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.117,--

